



REVIU

LAPORAN KINERJA PUSAT RISET KELAUTAN

20 23

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**



LAPORAN KINERJA PUSAT RISET KELAUTAN

20 23

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas Izin dan Rahmat-Nya penyusunan” Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023” dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusat Riset Kelautan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka terselenggaranya *good governance*.

Laporan ini menyajikan kinerja organisasi Pusat Riset Kelautan selama Tahun 2023. Metode penyajian kinerja mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini memberikan informasi capaian kinerja Pusat Riset Kelautan pada Tahun 2023 dan diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi Pusat Riset Kelautan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada periode berikutnya. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Riset Kelautan - BPPSDM telah menerapkan metode pengukuran kinerja berbasis *Logical Framework*. Kinerja Pusat Riset Kelautan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 sebagai dokumen kontrak kinerja tahunan.

Selanjutnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja Level 2 Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 yang meliputi capaian kinerja kegiatan lingkup Pusat Riset Kelautan

(Pusriskel). Capaian kinerja tersebut disumbang oleh 3 satuan kerja (satker) yang berada di lingkup Pusriskel yaitu satker Pusriskel, satker Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) – Bungus, dan satker Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) – Wakatobi.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dan sumbangsih semua pihak yang turut mendukung pencapaian kinerja Pusat Riset Kelautan pada Tahun 2023. Akhirnya, semoga laporan ini memberikan manfaat dan digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan dan tahun berikutnya.

Jakarta, 19 Januari 2024

Kepala Pusat Riset Kelautan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Hendra Yusran Siry

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Ringkasan Eksekutif	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Tugas, Fungsi, & Struktur Organisasi	6
C. Potensi dan Permasalahan	11
D. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM).....	13
E. Sistematika Laporan Kinerja (LKj).....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
A. Rencana Strategis Pusriskel 2020-2024	20
B. Rencana Kerja Tahunan 2023.....	25
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	27
D. Pengukuran Kinerja	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2023.....	36
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	37
C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023.....	68
D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya	71
BAB IV PENUTUP	75
A. Capaian Kinerja Utama	76
B. Permasalahan dan Rekomendasi	77
LAMPIRAN	79

Daftar Gambar

Gambar 1. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024	3
Gambar 2. Satker UPT Pusriskel	12
Gambar 3. Komposisi Pegawai Lingkup Pusriskel Berdasarkan Gender	14
Gambar 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	15
Gambar 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	16
Gambar 6. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional.....	16
Gambar 7. Pagu Anggaran Lingkup Pusriskel Revisi November 2023	26
Gambar 8. Postur Anggaran Pusriskel Revisi November 2023.	27
Gambar 9. Indeks Capaian IKK.....	30
Gambar 10. Nilai Capaian Kinerja Pusriskel Tahun 2023	36
Gambar 11. Realisasi Anggaran Lingkup Pusriskel Tahun 2023	69
Gambar 12. Nilai Capaian Kinerja Pusriskel Tahun 2023.....	76

Daftar Tabel

Tabel 1. Distribusi Pegawai Lingkup Pusat Riset Kelautan.....	14
Tabel 2. Sasaran Kegiatan Pusriskel Tahun 2023	21
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Pusat Riset Kelautan Sebelum dan Sesudah Revisi Tahun 2023	22
Tabel 4. Pagu anggaran kegiatan Pusriskel Tahun 2023.....	26
Tabel 5. Pagu anggaran kegiatan UPT Lingkup Pusriskel Tahun 2023.....	26
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan 2023	28
Tabel 7. Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IKK.....	32
Tabel 8. Nilai Indeks Status Capaian NPSS.....	33
Tabel 9. Standar Status Kinerja NKO.....	33
Tabel 10. Target dan Capaian Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023	37
Tabel 11. Capaian IKK Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	39
Tabel 12. Perbandingan Capaian IKK PNBPN dengan Satker Pusriskel.....	39
Tabel 13. Jenis dan nilai PNBPN Lingkup Pusriskel Tahun 2023.....	40
Tabel 14. Capaian IKK Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang Disepakati (Naskah Kerjasama).....	41
Tabel 15. Perbandingan Capaian IKK Kemitraan/Kerjasama dengan Satker Pusriskel	42
Tabel 16. Mitra Kerjasama Lingkup Pusriskel Tahun 2023.....	42
Tabel 17. Capaian IKK Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	44
Tabel 18. Perbandingan Capaian IKK Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan Satker Puslatluh.....	45

Tabel 19. Rekap Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Tahun 2023.....	45
Tabel 20. Capaian IKK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan (%).....	47
Tabel 21. Perbandingan Capaian IKK Batas tertinggi persentase temuan LHP BPK dengan Satker Pusdik	47
Tabel 22. Nilai IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK RI atas LK BRSDM TA 2022.	48
Tabel 23. Capaian IKK Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset kelautan (Indeks)	50
Tabel 24. Perbandingan Capaian IKK IP ASN dengan Satker Pusriskan ...	50
Tabel 25. Rekap Nilai IP ASN Pusat Riset Kelautan Tahun 2023.....	51
Tabel 26. Capaian IKK Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Kelautan (Nilai).....	52
Tabel 27. Perbandingan Capaian IKK PM SAKIP dengan Satker Pusriskan.....	52
Tabel 28. Nilai Komponen PM SAKIP Pusriskel Tahun 2023.....	53
Tabel 29. Capaian IKK Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (Nilai).....	54
Tabel 30. Perbandingan Capaian IKK Rekonsiliasi Kinerja dengan Satker Pusriskan	55
Tabel 31. Nilai Komponen PM SAKIP Pusriskel Tahun 2023	55
Tabel 32. Capaian IKK Persentase Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandard (%).....	58
Tabel 33. Perbandingan Capaian IKK MP dengan Satker Pusriskan.....	58
Tabel 34. Rekap Nilai MP Pusriskel Tahun 2023.....	59

Tabel 35. Capaian IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Kelautan (%)	60
Tabel 36. Perbandingan Capaian IKK Persentase rekomendasi pengawasan dengan Satker Pusdik	61
Tabel 37. Capaian IKK Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Pada Unit Kerja Pusat Riset Kelautan (Inovasi).....	62
Tabel 38. Perbandingan Capaian IKK Pelayanan Publik dengan Satker Pusdik.....	63
Tabel 39. Capaian IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai).....	64
Tabel 40. Perbandingan Capaian IKPA dengan Satker Sekretariat BPPSDM	65
Tabel 41. Capaian IKK Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai).....	66
Tabel 42. Perbandingan Capaian NKA dengan Satker Sekretariat BPPSDM	67
Tabel 43. Rincian Realisasi Anggaran Lingkup Pusriskel Tahun 2023.....	68
Tabel 44. Rincian Realisasi Anggaran Pusriskel Per IKK Tahun 2023.....	69
Tabel 45. Rincian Realisasi Per Sasaran Kegiatan Tahun 2023.....	70
Tabel 46. Perhitungan Efisiensi Anggaran Pusat Riset Kelautan.....	72
Tabel 47. Capaian Kinerja Pusriskel Tahun 2023	77

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja Pusriskel yang terukur atas capaian kerjanya pada Tahun 2023 dan diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi Pusriskel dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kerjanya pada periode berikutnya.

Pengukuran capaian kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan Aplikasi Kinerjaku tersebut pada Tahun 2023 Pusriskel memiliki nilai capaian kinerja sebesar **109,55%** sebagaimana berikut.



Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusriskel pada Tahun 2023 sebesar 109,55% dibentuk oleh capaian 12 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

sebagaimana tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja Pusriskel Revisi November 2023. Capaian kinerja keduabelas IKK Pusriskel pada Tahun 2023 terinci sebagaimana berikut:

1. Capaian IKK Nilai PNBSP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan adalah **43,53** Juta Rupiah dari target sebesar **29** Juta Rupiah sehingga memiliki persentase capaian sebesar **120,00%**;
2. Capaian IKK Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang Disepakati adalah **4** Naskah kerjasama dari target sebesar **3** Naskah sehingga memiliki persentase capaian sebesar **120,00%**;
3. Capaian IKK Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan adalah **100%** dari target sebesar **100%** sehingga memiliki persentase capaian sebesar **100,00%**;
4. Capaian IKK Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan adalah **0%** dari target sebesar **≤0,5%** sehingga memiliki persentase capaian sebesar **120,00%**;
5. Capaian IKK Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan adalah nilai **91,24** dari target nilai sebesar **78** sehingga memiliki persentase capaian sebesar **116,97%**;
6. Capaian IKK Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Kelautan adalah nilai **80,35** dari target nilai sebesar **75** sehingga memiliki persentase capaian sebesar **107,13%**;
7. Capaian IKK Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan adalah nilai **96,49** dari target nilai sebesar **93** sehingga memiliki persentase capaian sebesar **103,75%**;
8. Capaian IKK Persentase Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar adalah **116,58%** dari target nilai sebesar **92%** sehingga memiliki persentase capaian sebesar **120,00%**;
9. Capaian IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Kelautan adalah **80%** dari target nilai sebesar **80%** sehingga memiliki persentase capaian sebesar **100,00%**;
10. Capaian IKK Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan pada Unit Kerja Pusat Riset Kelautan adalah **1** Inovasi dari target sebesar **1** Inovasi sehingga memiliki persentase capaian sebesar **100,00%**;

11. Capaian IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan adalah nilai **90,98** dari target sebesar **93,75** sehingga memiliki persentase capaian sebesar **97,05%**;
12. Capaian IKK Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan adalah nilai **85,96** dari target sebesar **82** sehingga memiliki persentase capaian sebesar **104,83%**.

Secara umum kinerja pengelolaan anggaran lingkup Pusat Riset Kelautan pada Tahun 2023 sudah baik. Capaian realisasi anggaran lingkup Pusat Riset Kelautan sebesar 98,41% apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 98,50% maka persentase capaiannya adalah 99,91%.

Dalam proses pencapaian target kinerja pada Tahun 2023 dijumpai beberapa permasalahan, diantaranya adalah:

- a) Beberapa kegiatan kontraktual dikerjakan pada periode Triwulan IV, hal ini sangat berisiko pada gagalnya penyelesaian dan pembayaran pekerjaan;
- b) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023 tidak mencapai target. Dari 8 komponen pembentuk nilai terdapat 2 komponen yang berkontribusi kurang/ rendah yakni komponen Deviasi Halaman 3 DIPA dan Penyerapan Anggaran.

Terkait dengan permasalahan diatas maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Kegiatan kontraktual apalagi yang memiliki nilai pekerjaan diatas 200 juta agar diselesaikan paling lambat pada periode Triwulan II. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan kontraktual tidak terlalu berisiko tinggi, ikut mendukung maksimalnya capaian nilai IKK IKPA dan mendongkrak capaian realisasi anggaran satker;
- b) Setiap Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan (PJPK) seyogyanya Menyusun Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Capaian Fisik dan Anggaran sebagai target dan harus bisa memenuhi target tersebut. Pemenuhan target tersebut akan berdampak pada minimnya Deviasi Halaman 3 DIPA dan terpenuhinya target capaian realisasi anggaran.



BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang**
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**
- C. Potensi dan Permasalahan**
- D. Keragaan SDM**
- E. Sistematika Laporan Kinerja**



A. Latar Belakang

Pelaksanaan program dan kegiatan dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berazaskan akuntabilitas. Setiap penyelenggara negara dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil-hasilnya dari seluruh program dan kegiatan kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

Penerapan akuntabilitas mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan peraturan tersebut, Pusat Riset Kelautan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Sebagai implementasi dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas hasil penyelenggaraan kegiatan dan anggaran dimaksud maka Pusat Riset Kelautan menyusun Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Beberapa acuan yang digunakan dalam menyusun perencanaan kinerja adalah Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2021- 2024 dan Rencana Strategis BRSDM Tahun 2021-2024. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi. Kelima arahan utama arahan Presiden

tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024.



Gambar 1. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

Tujuh Agenda Pembangunan:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 dijabarkan ke dalam agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden tersebut ke dalam program-program pembangunan antara lain untuk kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, dan peningkatan devisa negara.

Renstra KKP menjelaskan bahwa Visi KKP didasarkan pada Visi Indonesia 2024 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan ke dalam 5 (lima) program Prioritas KKP yang meliputi (1) Penambahan Luas Kasawasan Konservasi, (2) Pangkapan Ikan Secara Terukur Berbasis Kuota, (3) Pengembangan Budidaya Laut, Pesisir dan Darat yang berkelanjutan, (4) Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan (5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Partisipasi Nelayan atau Gerakan Cinta Laut.

Visi dan Misi

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi BPPSDM pada Tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi Pusriskel mengacu pada visi BPPSDM dan KKP:

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”

Misi Pusriskel adalah menjalankan misi Presiden, KKP dan BPPSDM dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden,

Pusriskel mendukung 4 (empat) misi yang merupakan modifikasi dari misi yang diemban oleh KKP dan BPPSDM. Modifikasi dilakukan dengan penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusriskel, yaitu:

1. Misi Ke-1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan;
2. Misi ke-2: Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan terhadap Perekonomian Nasional melalui Hasil Riset Kelautan;
3. Misi ke-4: Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan;
4. Misi ke-8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Pusat Riset Kelautan.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 ini adalah:

1. Mengukur capaian kinerja IKK yang ingin dicapai melalui program kerja dan kegiatan terkait pada Tahun 2023;
2. Mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja IKK pada Tahun 2023;
3. Menyusun akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan pada Tahun 2023.

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian kinerja Pusriskel pada Tahun 2023;

2. Menjadi bahan perbaikan bagi Pusriskel dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada periode berikutnya.

B. Tugas, Fungsi, & Struktur Organisasi

Berdasarkan Perpres Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah ditetapkan dan diundangkan pada 16 Juni 2023, menyebutkan bahwa salah satu unit kerja Eselon I di lingkungan KKP adalah Badan Penvuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP). BPPSDMKP merupakan unit kerja baru pengganti dari nomenklatur unit kerja Eselon I sebelumnya yakni Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP).

Peraturan presiden tersebut seyogyanya diikuti dengan peraturan turunan di tingkat kementerian KKP, tetapi hingga saat ini Permen KP tentang SOTK KKP belum terbit. Oleh karenanya dalam masa transisi ini, tugas, fungsi dan struktur organisasi di bawah BPPSDMKP masih mengacu kepada peraturan yang ada dan masih berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 159 dan 160 menyatakan bahwa Pusat Riset Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Pusat Riset Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;

- b. penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset kelautan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan pusat.

Untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dan dalam menjalankan ketenaganukliran serta keantariksaan, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). BRIN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Bab VII tentang Pengintegrasian, Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa:

- (1) Tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN.
- (2) Pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pengalihan pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dan menjadi pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset BRIN.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah Kementerian/Lembaga (K/L) yang menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan penelitian, pengembangan dan penerapan beserta Sumber Daya Manusia, Aset dan Anggaran pendukungnya sebelum terbitnya Perpres Nomor 78 Tahun 2021.

Sebagai implementasi amanah Perpres Nomor 78 Tahun 2021 maka pada tahun 2022 KKP telah melakukan serangkaian langkah sebagai tindaklanjutnya. Beberapa langkah yang telah dilaksanakan oleh KKP diantaranya adalah:

1. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) sebagai sebuah unit kerja Eselon I di lingkungan KKP sudah tidak menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan terkait penelitian, pengembangan dan penerapan;
2. KKP melaksanakan serah terima alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dari BRSDMKP kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pada Kamis, 27 Oktober 2022, di Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT), Denpasar, Bali;
3. Pengalihan SDM Riset KKP ke BRIN berjumlah 529 orang terdiri atas 367 orang peneliti, 81 orang perekayasa dan 81 orang teknisi litkayasa dan telah dilantik menjadi jabatan fungsional periset di BRIN. Khusus dari BRSDM, SDM yang pindah ke BRIN berjumlah 443 orang.
4. Pemindahan anggaran riset dan belanja pegawai ke BRIN.

Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan BRSDMKP, KKP pada tahun anggaran 2022 sudah tidak menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan terkait penelitian, pengembangan dan penerapan. Pada bulan November 2022 Pusriskel telah memproses revisi DIPA ke-7 terkait pemindahan anggaran riset dan belanja pegawai ke BRIN. Oleh karenanya sejak tahun 2022, Pusriskel sudah tidak memiliki IK terkait kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan. Sehingga fungsi-fungsi a sampai c sudah tidak dapat dilaksanakan.

Secara kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, lingkup Pusriskel terdapat 3 (tiga) satuan kerja, yaitu 1) Pusat Riset Kelautan-Jakarta; dan 2) UPT (Unit Pelaksana Teknis) di Pusriskel, yakni 1) Loka Riset Sumberdaya Kerentanan Pesisir (LRSDKP)-Bungus, Sumatera Barat (PermenKP No. 28 Tahun 2020); dan 2) Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK)-Wakatobi, Sulawesi Tenggara (PermenKP No. 85 Tahun 2020); serta Instalasi Pengelolaan Sumberdaya Air Laut (IPSAL)-

Madura, Jawa Timur; Unit Rintisan Teknologi Kelautan (PIAMARI)-Pangandaran, Jawa Barat dan calon UPT MIAMARI-Morotai, Maluku Utara.

Untuk membantu penyelenggaraan tugas dan fungsi Pusat Riset Kelautan tersebut, maka Kepala Pusat Riset Kelautan telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor B.4.1/BRSDM.2/KP.440/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 untuk memberikan perintah melaksanakan tugas sebagai Ketua Kelompok Indikator Kinerja Kegiatan, Penanggung Jawab IKK, dan Anggota, pada Pusat Riset Kelautan di samping jabatan fungsionalnya.

Per 1 Agustus 2023 telah diterbitkan Surat Perintah Nomor B.821/BRSDM.2/KP.440/VIII/2023 menggantikan Surat Perintah sebelumnya untuk menjadi Ketua dan/atau anggota Tim Kerja sesuai susunan keanggotaan Tim Kerja dan tugasnya, yakni:

A. Tim Kerja SDM Aparatur dan Umum, mempunyai tugas:

1. Koordinasi dan pelaksanaan Penatausahaan Pengadaan Barang/Jasa; Pengelolaan Unit Rintisan (PIAMARI, MIAMARI, Lab. Pasar Minggu, Lombok, Saumlaki, Natuna); Pengelolaan Sarana Perkantoran (Ancol); Pengelolaan BMN; Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan; Pengelolaan PBJ operasional kantor; Penatausahaan Perjalanan Dinas dan Pertemuan Pimpinan; Penatausahaan pertemuan pimpinan; Pengelolaan Urusan rumah tangga; Pengelolaan *Whistle Blower*; Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest/ COI*); Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG); Penatalaksanaan SOP, Surat Keputusan, Surat Perintah, dan Naskah Akademik;
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan manajemen SDM aparatur lingkup Pusat Riset Kelautan;
3. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan proposal PNBP, pembinaan penatalaksanaan PNBP UPT, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PNBP;
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

B. Tim Kerja Keuangan, mempunyai tugas:

1. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN, Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN, dan Penyusunan Laporan PIPK dan SPIP;
2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, penatausahaan kontraktual, pembayaran tagihan kontraktual dan non kontraktual;
3. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan Laporan Capaian Output, Penyusunan Laporan Serapan Anggaran, dan Input Aplikasi SMART-DJA;
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

C. Tim Kerja Program, mempunyai tugas:

1. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan program, anggaran, dan kinerja serta revisi dokumen perencanaan, penilaian mandiri SAKIP, pemenuhan dokumen SAKIP lainnya, penyusunan laporan evaluasi SAKIP, dan koordinasi dan pelaksanaan revisi anggaran;
2. Koordinasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja (LKj), penyusunan laporan satuan kerja, pelaksanaan rekonsiliasi capaian kinerja, penilaian mandiri rekonsiliasi kinerja, dan pemenuhan dokumen rekonsiliasi kinerja lainnya;
3. Koordinasi dan pelaksanaan pemenuhan dokumen tindak lanjut, pendampingan pelaksanaan pengawasan APIP, dan penyusunan laporan tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

D. Tim Kerja Pelayanan Teknis, mempunyai tugas:

1. Inisiasi, koordinasi, dan pelaksanaan kerjasama, telaah dokumen kerjasama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, penyusunan laporan pelaksanaan kerjasama, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan SFV, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SFV, dan penyusunan laporan pelaksanaan SFV;

2. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan: Bitrix, Data dan Informasi, Jurnal, Sistem Informasi, Command Center, dan PPID;
3. Koordinasi, pendampingan, penyiapan dan penerapan Layanan publik, pelayanan konsultasi bagi masyarakat umum, Persiapan menuju WBK, pendampingan penerapan pelayanan publik, pengelolaan media sosial, podcast, layanan design grafis/ flyer/ konten creator dan dokumentasi kegiatan, diseminasi/ pameran/ fasilitasi peliputan berita;
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Pusriskel merupakan salah satu unit eselon II di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Riset Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Riset Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- b. penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset kelautan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan pusat.

Cakupan organisasi Pusriskel meliputi: 1) Pusat Riset Kelautan; 2) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir; 3) Loka Perencanaan Teknologi Kelautan; dan 4) Kelompok Jabatan Fungsional. Disamping itu juga terdapat 2 Instalasi (Instalasi Pengelolaan Sumberdaya Air Laut Pamekasan dan Instalasi Laboratorium SATREPS Pasar Minggu) dan 1 Unit Rintisan (PIAMARI Pangandaran), serta masih ada 1 calon UPT yaitu MIAMARI Morotai.



Gambar 2. Satker UPT Pusriskel

Pada awal tahun 2023, perubahan keragaan pegawai yang terjadi adalah perubahan jabatan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional, yang mengakibatkan berubahnya komposisi jabatan dan juga beralihnya pegawai ke luar satuan kerja Pusat Riset Kelautan. Sumber Daya Manusia (SDM) Lingkup Pusat Riset Kelautan pada Tahun 2023 total berjumlah 130 orang, yang terdiri dari 70 orang pegawai PNS dan 60 orang tenaga kontrak.

Disamping itu, Pusat Riset Kelautan juga didukung oleh adanya bengkel/workshop mekanikal, material, modeling, mekatronika serta *Authomatic Identification System (AIS)*, Aquarium sebagai *bank coral* dan ikan air, dan laboratorium pengembangan produk garam yang cukup lengkap.

2. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

- 1) Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengakibatkan beberapa hal antara lain:
 - a. Seluruh sumberdaya riset, baik sumber daya manusia, anggaran dan program riset berpindah ke BRIN;
 - b. Pusat Riset Kelautan tidak memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Riset lagi;
 - c. Pusat Riset belum bisa mengusulkan program dan kegiatan baru menunggu terbentuknya organisasi baru;
 - d. Program dan anggaran yang dapat dilaksanakan adalah kegiatan rutin perkantoran berupa dukungan manajemen;
- 2) Pemanfaatan aset dan sarana prasarana eks-riset belum optimal.

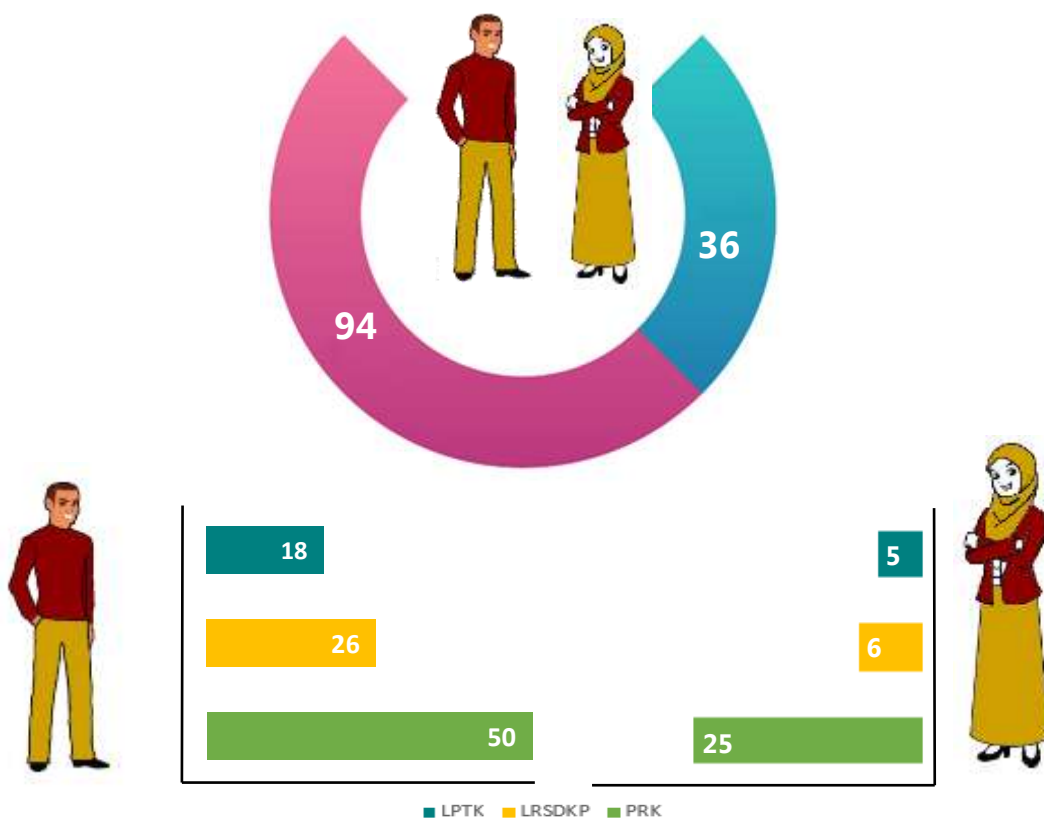
D. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Tahun 2023, perubahan keragaan pegawai yang terjadi adalah pegawai memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), pengangkatan PPPK pada Pusat Riset Kelautan dan LPTK, Wakatobi, perpindahan pegawai dari AK Wakatobi ke Pusat Riset Kelautan dan perpindahan pegawai Non ASN dari Pusat Riset Kelautan ke Biro Hukum, KKP. Sehubungan dengan perubahan data tersebut, distribusi pegawai pada Pusat Riset Kelautan dan UPT dibawahnya berdasarkan jenis kelamin, sebaran pendidikan dan jabatan fungsional kami sampaikan dalam tabel dan grafik dibawah ini:

Tabel 1. Distribusi Pegawai Lingkup Pusat Riset Kelautan

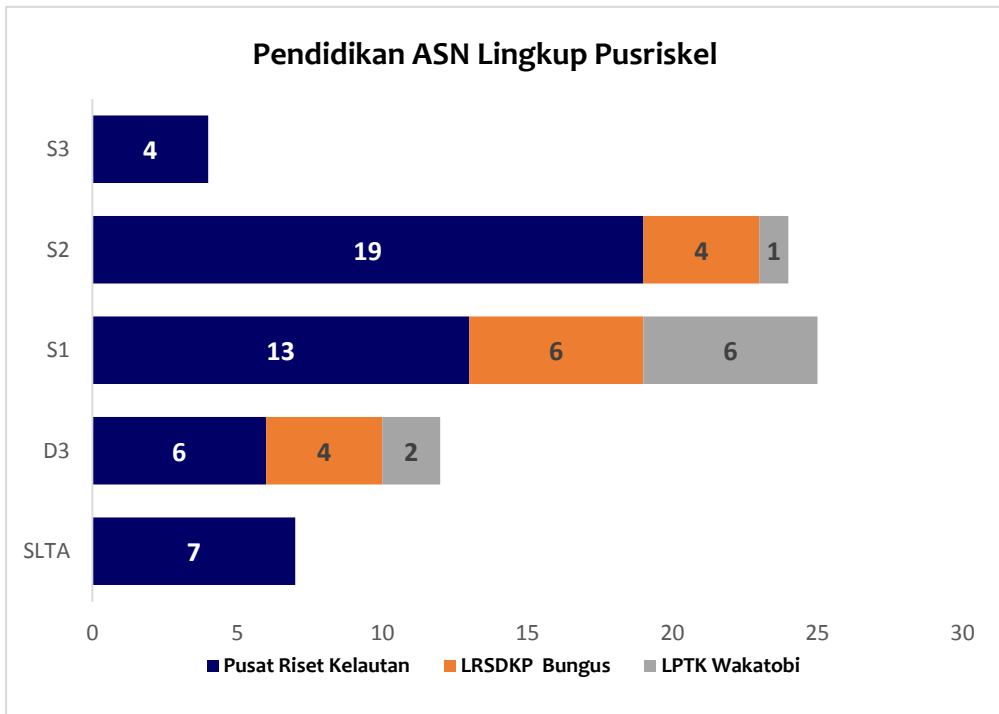
Jenis Kelamin Berdasarkan Satker dan Jenis Kepegawaian	PNS		KONTRAK		Jumlah
	L	P	L	P	
Pusriskel	34	15	16	10	75
LRSDKP	10	4	16	2	33
LPTK	8	1	10	4	23
JUMLAH	52	20	42	16	130

Jumlah pegawai pada Desember 2023 di lingkup Pusriskel adalah sejumlah 130 pegawai, yang terdiri dari 72 pegawai ASN dan 58 pegawai non ASN. Dari keseluruhan pegawai yang ada pembagian persentase perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 72.30 % dan 27.69%.



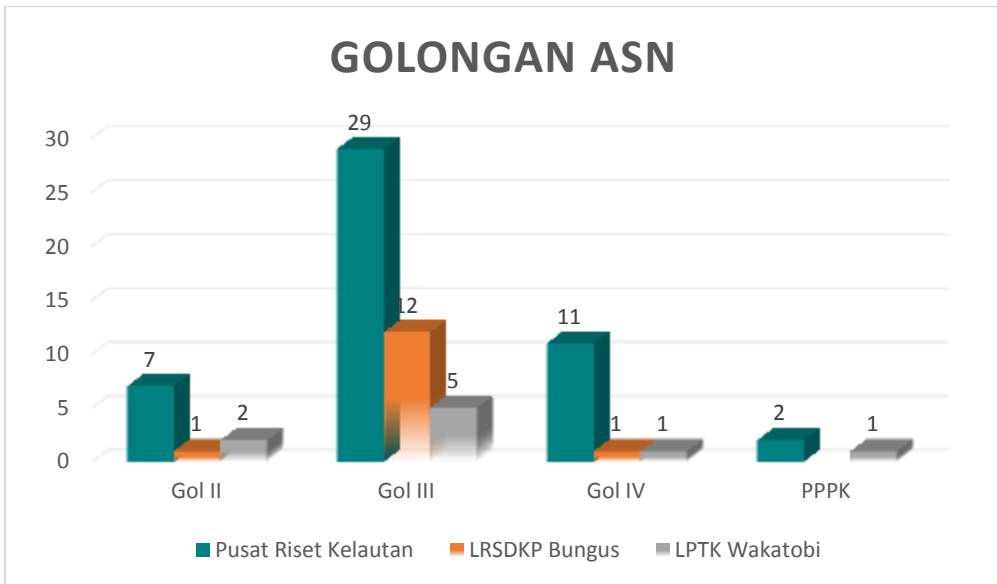
Gambar 3. Komposisi Pegawai Lingkup Pusriskel Berdasarkan Gender

Pada tahun 2023 terdapat penambahan pegawai ASN, yaitu 3 pegawai PPPK yang bertugas di Pusriskel sebanyak 2 orang pegawai dan 1 pegawai yang bertugas di LPTK. Selain itu terdapat juga penambahan 1 orang PNS yang masuk ke Pusriskel dan 1 pegawai yang mutasi dari Pusriskel.

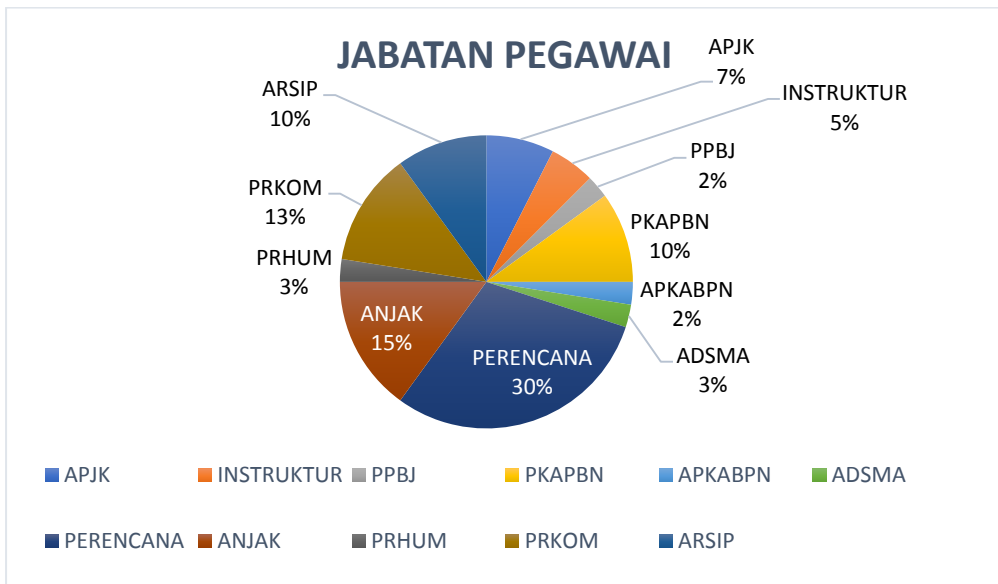


Gambar 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Data Pendidikan pegawai merupakan salah satu indikator penilaian IP ASN pada dimensi Kualifikasi. Oleh karena itu peningkatan Pendidikan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan JF pegawai merupakan komitmen dari pimpinan. Pada tahun 2023 terdapat 1 pegawai tugas belajar, dan 6 pegawai izin belajar. Dari 6 pegawai izin belajar, 3 diantaranya telah menyelesaikan program S-1 dan tinggal menunggu proses pencantuman gelar. Pada tahun 2024 diproyeksikan terdapat tambahan 2 pegawai tugas belajar dan 1 pegawai izin belajar.



Gambar 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Gambar 6. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional berjumlah 40 orang, yang terdiri dari masing-masing jabatan fungsional antara lain: APJK, PPBJ, Instruktur, Analis Kebijakan, Pranata Keuangan APBN, Analis

Pengelola Keuangan APBN, Analis Kepegawaian, Perencana, Analis Kebijakan, Pranata Humas, Pranata Komputer, dan Arsiparis. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada lingkup Pusat Riset Kelautan jabatan fungsional perencana memiliki persentase tertinggi dengan jumlah Perencana sebanyak 12 orang pegawai (30%), selanjutnya jabatan Analis Kebijakan sebanyak 6 orang pegawai (15%).

E. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan ini adalah sebagai berikut:

- **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, dan capaian kinerja serta kendala selama Tahun 2023;
- **Bab I – Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang unit kerja Pusat Riset Kelautan seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di Pusat Riset Kelautan;
- **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menyajikan rencana strategis Pusat Riset Kelautan pada TA 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan kinerja tahunan Tahun 2023 serta pengukuran kinerja;
- **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan keuangan Tahun 2023:
 - a) Capaian Kinerja Organisasi
 - Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023;
 - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022;
 - Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standar nasional; (jika ada);

- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
 - Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
 - Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
- b) Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan dan seluruh UPT.
- **Bab IV - Penutup**, menyajikan uraian singkat kesimpulan terhadap pencapaian kinerja Tahun 2023 serta Permasalahan dan Rekomendasi.
 - **Lampiran:**
 - a) Perjanjian Kinerja Pusriskel TA 2023;
 - b) Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Renstra Pusriskel 2020 -2024
- B. Rencana Kerja Tahunan 2023
- C. Perjanjian Kinerja TA 2023
- D. Pengukuran Kinerja



A. Rencana Strategis Pusriskel 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 159 dan 160 menyatakan bahwa Pusat Riset Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pusriskel berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis BRSDMKP Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia dan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra BRSDM, adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (Renstra BRSDM) Tahun 2020 – 2024 sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan Riset dan Sumber Daya Manusia merupakan reviu Renstra Balitbang KP dan BPSDMP KP Tahun 2015 – 2019, sebagai turunan dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Permen KP) Nomor 25/PERMEN-KP/2015.

1. Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi diatas, Pusat Riset Kelautan telah menetapkan rencana kinerja dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran 2023 dan bertujuan untuk :

- 1) Menyelenggarakan riset kelautan secara terpadu dengan tata kelola yang baik (*good governance*);
- 2) Mempercepat pemanfaatan hasil riset lingkup internal Pusriskel dan *stakeholder* strategis lainnya;

- 3) Meningkatkan kompetensi Riset SDM kelautan yang mampu meningkatkan, nilai tambah dan daya saing kelautan secara optimal.

2. Sasaran

Rencana strategis (Renstra) menyajikan sasaran kegiatan yang hendak dicapai, yang dapat diukur berdasarkan indikator kinerja yang ada. Berdasarkan Sasaran Program BRSDM KP, Pusat Riset Kelautan kemudian menindaklanjutinya dengan menyusun Peta Strategi Level II Pusat Riset Kelautan TA 2023, yang telah disepakati antara Kepala Pusat Riset Kelautan dengan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Peta strategi Pusat Riset Kelautan memetakan setiap Sasaran Kegiatan (SK) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi *Logical Framework*, Sasaran Kegiatan (SK) Pusat Riset Kelautan pada November 2023 direvisi karena adanya *cut off* anggaran, dimana semula terdapat 3 Sasaran Kinerja berubah menjadi 1 Sasaran Kinerja, sehingga perubahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Kegiatan Pusriskel Tahun 2023

	Semula	Menjadi
SK 1	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan
SK 2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	-
SK 3	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan	-

Selanjutnya target kinerja T.A 2023 tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan yang mempresentasikan rencana dan janji untuk mentargetkan kinerja yang

jasas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimilikinya. Awal Tahun 2023, Pusat Riset Kelautan telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan dengan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM). Pada kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (*strategy map*) dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Renstra Pusat Riset Kelautan Tahun 2020-2024 menjelaskan bahwa Sasaran Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset kelautan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Pusat Riset Kelautan sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metode *Logical Framework*.

Pada November 2023 Rencana Kerja Tahunan Pusat Riset Kelautan direvisi karena adanya *cut off* anggaran, dimana semula terdapat 14 indikator kinerja berubah menjadi 12 indikator kinerja. Terdapat beberapa perubahan Rencana Kerja Tahunan baik nomenklatur Indikator Kinerja maupun target kinerja yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Pusat Riset Kelautan Sebelum dan Sesudah Revisi Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET Januari 2023	TARGET April 2023	TARGET November 2023
1.	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1.	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7	7	Tidak digunakan
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	2.	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3	3	Tidak digunakan
Sasaran Program: Tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkup BPPSDM						
3.	Tatakelola	3.	Nilai PNBP Satker	8,5	8,5	29

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET Januari 2023	TARGET April 2023	TARGET November 2023
Pemerintahan yang Baik pada Pusat Riset Kelautan		Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)			
	4.	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3	3	3
	5.	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100	100	100
	6.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
	7.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	78	78	78
	8.	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (Nilai)	75	75	75
	9.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (Nilai)	92	92	93
	10.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92	92	92
	11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	75	80
	12.	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik	1	1	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET Januari 2023	TARGET April 2023	TARGET November 2023
		(Unit)			
		13. Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (Nilai)	89	89	93,75
		14. Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (Nilai)	82	82	82

Peta strategi Pusat Riset Kelautan memetakan setiap Sasaran Kegiatan (SK) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi *logical framework*, Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Pusat Riset Kelautan berdasarkan Perjanjian Kinerja revisi November Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan (SK) 1, dengan sasaran yang akan dicapai adalah **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan**, terdiri atas 12 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

- IKK 1: Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta) dengan target 29 Juta dan merupakan IKK baru pada tahun 2023;
- IKK 2: Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama) dengan target 3 Kerjasama/Kemitraan pada tahun 2023, pada tahun 2022 tidak ada IKK ini. Pada tahun 2021 dan 2020 nama IKK tersebut adalah Jejaring dan/atau kerjasama riset Kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti dengan target 26;
- IKK 3: Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%), dengan target 100% setiap tahun selama 2020-2024;
- IKK 4: Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan (%), dengan target $\leq 0,5\%$ sedangkan pada tahun 2022, 2021 dan 2020 dengan target $\leq 1\%$;
- IKK 5: Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks), dengan target 78, pada tahun 2022 dengan target 76, tahun 2021 dengan target 73 dan tahun 2020 dengan target 72;

- IKK 6: Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai) dengan target nilai 75 (merupakan IKK baru pada tahun 2023);
- IKK 7: Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (Nilai), dengan target nilai 93, tahun 2022 dengan target 92, dan pada tahun 2021 dengan target 87 (merupakan IKK baru pada tahun 2021);
- IKK 8: Persentase Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%), dengan target 92%, tahun 2022 dengan target 86%, tahun 2021 dengan target 84%, dan tahun 2020 dengan target 82%;
- IKK 9: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Kelautan (%), dengan target 80%, pada tahun 2022 target 70%, pada tahun 2021 target 65%, dan pada tahun 2020 target 60%;
- IKK 10: Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada Unit kerja Pusat Riset Kelautan (inovasi) dengan target 1 inovasi, dan pada tahun 2022 target 1 unit (merupakan IKK baru pada tahun 2022);
- IKK 11: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (nilai) dengan target nilai 93,75 merupakan IKK baru pada tahun 2023;
- IKK 12: Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (nilai) dengan target nilai 82, merupakan IKK baru pada tahun 2023.

B. Rencana Kerja Tahunan 2023

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran kegiatan, maka Rencana Kerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 menetapkan 1 program yaitu Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan pagu anggaran semula sebesar Rp. 33.650.000.000,- direvisi pada November 2023 menjadi sebesar Rp. 31,235,000,000,- dengan rincian kegiatan:

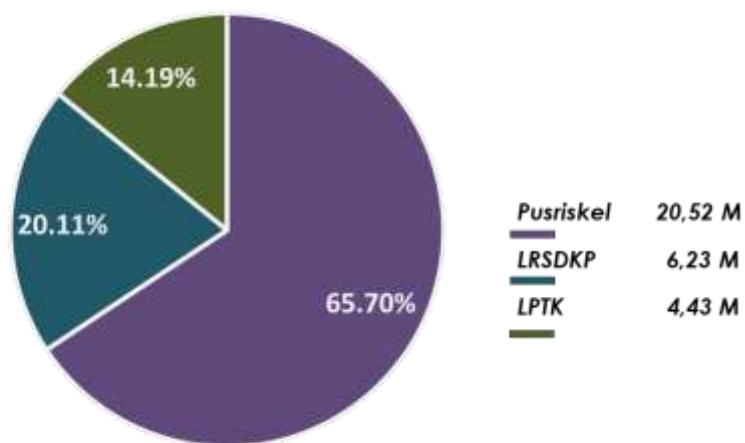
Tabel 4. Pagu Anggaran Kegiatan Pusriskel Tahun 2023

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	
		Semula	Menjadi
1.	Hasil Perumusan Kebijakan	2.800.000.000,-	0
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	30.850.000.000,-	31.235.000.000,-

Rincian anggaran Pusat Riset Kelautan dan masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Pagu anggaran kegiatan UPT Lingkup Pusriskel Tahun 2023

No.	Satker	Pagu Anggaran (Rp.)	
		Awal	Revisi November
1	Pusat Riset Kelautan	22.687.649.000,-	20.522.649.000,-
2	Loka Riset Sumber Daya Kerentanan Pesisir	6.429.852.000,-	6.279.825.000,-
3	Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	4.532.499.000,-	4.432.499.000,-



Gambar 7. Pagu Anggaran Lingkup Pusriskel Revisi November 2023



Gambar 8. Postur Anggaran Pusriskel Revisi November 2023.

Berdasarkan postur anggaran Lingkup Pusriskel terlihat bahwa jenis belanja paling besar dialokasikan untuk Belanja Barang sebesar Rp. 21.060.000.000,- atau 67,42%; dan Belanja Pegawai sebesar Rp. 10.175.000.000,- atau 32,58% sedangkan anggaran Belanja Modal mengalami *cut off* (0%).

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Peirkanan kepada Kepala Pusat Riset Kelautan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan sasaran kegiatan dan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai tolak ukur dan dasar evaluasi kinerja, serta sebagai dasar penilaian kegagalan/keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 telah ditandatangani oleh Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan dan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) pada Januari 2023. Pada bulan April 2023 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja karena adanya pelantikan

Kepala Pusat Riset Kelautan yang baru, namun tidak terdapat perubahan pada Perjanjian Kinerja baik indikator maupun target kinerja, kemudian pada November 2023 dilakukan revisi kedua karena *cut off* anggaran dan dihapusnya 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK);
2. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit).

serta adanya perubahan target 4 indikator kinerja yaitu:

1. Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta), target semula 8,5 menjadi 29;
2. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai), target semula 92 menjadi 93;
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%), target semula 75 menjadi 80;
4. Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai), target semula 89 menjadi 93,75.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET Januari 2023	TARGET April 2023	TARGET November 2023
1.	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1.	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7	7	Tidak digunakan
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	2.	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3	3	Tidak digunakan
Sasaran Program: Tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkup BPPSDM						
3.	Tatakelola Pemerintahan yang Baik pada	3.	Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5	8,5	29

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET Januari 2023	TARGET April 2023	TARGET November 2023
Pusat Riset Kelautan	4.	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3	3	3	
	5.	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100	100	100	
	6.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	
	7.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	78	78	78	
	8.	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75	75	75	
	9.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	92	92	93	
	10.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92	92	92	
	11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	75	80	
	12.	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	1	1	1	
	13.	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89	89	93,75	
	14.	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82	82	82	

D. Pengukuran Kinerja

a. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja Pusriskel Tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya, dengan rumus pengukuran sebagai berikut:


$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana, maka dapat dilihat jumlah persentase capaian pada masing-masing indikator kinerja, dan akan diperoleh indeks capaian IKK.

Penghitungan indeks capaian IKK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;

Adapun status Indeks capaian IKK adalah sebagai berikut:



Gambar 9. Indeks Capaian IKK

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen *Balanced Scores Card (BSC)*.

b. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BRSDM dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada triwulan I (Bo3), triwulan II (Bo6), triwulan III (Bo9) dan triwulan IV (B12). Adapun pelaksanaan pengukuran dan pelaporan kinerja adalah bulan berikutnya setelah satu periode triwulan berakhir. Pengukuran dan pelaporan kinerja periode Bo3 dilaksanakan pada bulan April, periode Bo6 pada bulan Juli, periode Bo9 pada bulan Oktober, dan periode B12 pada bulan Januari tahun berikutnya.

Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran kinerja adalah Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Pusriskel sebagai bagian dari Tim Pengelola Kinerja Pusriskel tahun 2023 berdasarkan Surat Perintah Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan nomor B.2611/BRSDM.2/TU.421/III/2023. Adapun yang bertugas menyusun Laporan Kinerja lingkup Pusriskel adalah Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan 2023 yang ditetapkan melalui Surat Perintah Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan Nomor: B.266/BRSDM.2/TU.110/III/2023.

Hasil pengukuran kinerja triwulanan dilaporkan oleh Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja kepada Manajer Tim Pengelola Kinerja sebagai pejabat tertinggi dalam Tim Pengelola Kinerja. Selanjutnya Manajer Tim Pengelola Kinerja melaporkan hasil pengukuran kinerja kepada kepala unit kerja yakni Kepala Pusriskel. Hasil pengukuran kinerja tersebut merupakan bahan penyusunan laporan kinerja Pusriskel.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis

pada peta strategi yang dituangkan pada dokumen Penetapan Kinerja Pusriskel Tahun 2023 dapat tercapai.

Pengukuran kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 mengacu pada hasil pengukuran yang telah ditetapkan dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat website: <http://kinerjaku.kkp.go.id/2023>. Penilaian pencapaian sasaran diukur berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

NKO adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKK di dalam satu Sasaran Kegiatan (SK). Status capaian SK yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau/biru (buruk/sedang/baik/istimewa) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NKO perlu diperhatikan bobot masing-masing IKK terhadap SK tersebut dengan indeks toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKK sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7. Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IKK

No.	Validitas IKK	Bobot
1.	Outcome	0,1
2.	Output Kendali Tinggi	0,2
3.	Output Kendali Rendah	0,3

Tingkat validitas diatas memiliki bobot yang berbeda didasarkan oleh karakter indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Validitas Outcome yaitu hasil/manfaat/dampak yang diharapkan oleh *stakeholder/customer* pemilik indikator dalam jangka pendek, menengah atau Panjang;
2. Validitas Output Kendali Tinggi yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator;
3. Validitas Output Kendali Rendah yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan selain pemilik indikator.

Tabel 8. Nilai Indeks Status Capaian NPSS

Warna	Nilai
Istimewa	110 - 120
Baik	90 - < 110
Cukup	70 - < 90
Kurang	50 - < 70
Sangat kurang	< 50
Belum ada penilaian	

Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menyepakati standar status kinerja NKO sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 9. Standar Status Kinerja NKO

KLASIFIKASI			STATUS KINERJA (Toleransi o%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
$X < 50\%$	$X > 50\%$	$X > 50\%$ atau $X < 50\%$	Sangat Kurang
$X = 50\% - < 70\%$	$X = 50\% - > 70\%$	-	Kurang
$X = 70\% - < 90\%$	$X = 70\% - > 90\%$	-	Cukup
$X = 90\% - < 120\%$	$X = 90\% - > 120\%$	$X = 100\%$	Baik
$X \geq 110\%$	$X \leq 120\%$	-	Istimewa


Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah: *Maximize* adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Minimize* adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Stabilize* adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Halaman Kosong





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2023**
 - B. Evaluasi dan Analisis Kinerja**
 - C. Efisiensi Sumber Daya dan Alokasi Anggaran**
 - D. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023**
- 

A. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 mengalami perubahan dan penyesuaian yang mengacu pada *Balanced Score Card* (BSC). Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, ada indikator kinerja yang telah berhasil dicapai. Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2023 dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Logical Framework* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh nilai capaian kinerja Pusat Riset Kelautan di tingkat korporat Tahun 2023 sebesar **109,55%** sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 10. Nilai Capaian Kinerja Pusriskel Tahun 2023

Dari hasil pengukuran kinerja Tahun 2023 dapat diketahui bahwa seluruh indikator kinerja telah memiliki capaian sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan nilai kinerja baik yang ditunjukkan dengan indikator berwarna hijau.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2023 Pusat Riset Kelautan memiliki kinerja baik ditandai dengan indikator capaian berwarna biru dan hijau. Terdapat 1 IKK Pusriskel yang tidak mencapai nilai target yang telah ditetapkan, yakni IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai), namun demikian karena persentase capaiannya adalah 97,05% maka masih termasuk dalam capaian kinerja dengan kategori baik (> 90%) dan indikator capaian berwarna hijau. Selengkapnya capaian kinerja Pusriskel pada Tahun 2023 sebagaimana disajikan tabel berikut.

Tabel 10. Target dan Capaian Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA		2023		
		T	R	%
1.	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	29	43,53	120,00
2.	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (Naskah Kerjasama)	3	4	120,00
3.	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100	100	100,00
4.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan (%)	≤ 0,5	0	120,00
5.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	78	91,24	116,97
6.	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Kelautan (Nilai)	75	80,35	107,13
7.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (Nilai)	93	96,49	103,75
8.	Persentase Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92	116,58	120,00
9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Kelautan (%)	80	80	100,00
10.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja Pusat Riset Kelautan (Inovasi)	1	1	100,00
11.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat	93,75	90,98	97,05

INDIKATOR KINERJA		2023		
		T	R	%
	Riset Perikanan (Nilai)			
12.	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (Nilai)	82	85,96	104,83

Rincian pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2023 yang mengacu pada *logical framework* adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan

IKK 1: Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNBP adalah pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum Pengelolaan PNBP diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP;
- b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP;
- c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Revisi November 2023 target IKK ini ditetapkan sebesar 29 Juta Rupiah. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Capaian IKK Nilai PNBPsatker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)

SK- 1			Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan						
IKK- 1			Nilai PNBPsatker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)						
Realisasi 2020 - 2022			2023				Renstra Pusriskel 2020-2024		
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024	
-	-	-	29	43,53	120	-	-	-	

Pada Tahun 2023 capaian indikator kinerja ini telah melebihi target yang ditetapkan, yakni mencapai 43,53 juta rupiah dari target 29 juta rupiah, dengan persentase capaian sebesar 149,52%, namun karena nilai maksimal pada Aplikasi Kinerjaku adalah 120% maka persentase capaian IKK ini adalah 120%.

Capaian IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 karena merupakan IKK baru pada tahun 2023. Capaian indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra Pusriskel 2020-2024 karena belum dituangkan dalam Renstra Pusriskel 2020-2024, karena merupakan IKK baru pada tahun 2023.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian PNBPsatker Pusat Riset Perikanan persentase capaian IKK ini sama yakni sebesar 120% sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 12. Perbandingan Capaian IKK PNBPsatker dengan Satker Pusriskel

Satker	Target	Realisasi	%
Pusriskel	29	43,53	120
Pusriskel	1,73	3,40	120

Keberhasilan capaian IKK ini disebabkan oleh adanya kontrak kinerja (konkin) dengan Kemenkeu terkait penentuan target PNBPsatker,

komitmen pimpinan unit kerja dalam mencapai target PNPB yang telah ditetapkan dan kepemilikan aset (sarpras) yang dapat menghasilkan PNPB. Capaian PNPB Pusriskel berasal dari penerimaan kas negara atas pemanfaatan BMN, pembayaran denda, sewa bangunan dan pengembalian anggaran tahun yang lalu serta hasil pengembangan IPTEK pada Satker UPT Pusriskel. Nilai capaian IKK ini sesuai surat Dinas Sekretaris BRSDM KP Nomor B.257/BPPSDM.1/KU.340/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 Tentang Capaian Realisasi PNPB dan BLU BPPSDM TA 2023. Secara rinci PNPB lingkup Pusriskel tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 13. Jenis dan nilai PNPB Lingkup Pusriskel Tahun 2023

No.	Jenis	Nilai (Rp.)	Satker
1.	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tusi	30,894,000	LRSDKP
2.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	179,400	LRSDKP
3.	Pendapatan Sewa tanah, Gedung dan Bangunan	4,270,782	LPTK
4.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Anggaran Tahun yang Lalu	547,641	LPTK
5.	Pendapatan Penelitian Riset, Survey, Pemetaan dan Pengembangan Iptek lainnya	7,645,775	LPTK
TOTAL		43,537,598	

Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja ini adalah melaksanakan kegiatan pelayanan jasa yang menghasilkan penerimaan dan melakukan monitoring perkembangan perolehan penerimaan secara berkala misalnya bulanan dan triwulanan. Penerimaan PNPB di peroleh dari penyewaan alat riset, diantaranya TOA, Echosounder, Tide Master dan alat komputer pendukungnya oleh *stakeholder*, yakni CV Mahika Tjpta Abadi, Hidronav dan Universitas Riau pada Satker UPT LRSDKP Bungus, serta pendapatan sewa rumah negara yang dimanfaatkan oleh pegawai LPTK Wakatobi, penerimaan kembali anggaran LPTK Wakatobi tahun 2022, dan hasil penjualan WakatobiAIS.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 84.901.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar

Rp. 83.500.020,- atau sebesar 98,35%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 21,65%.

IKK 2: Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang Disepakati (Naskah Kerjasama)

Kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama. Kerja sama adalah penyelenggaraan kerja sama antara Pusat Riset Kelautan dengan pihak mitra pada Tahun 2023 yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama *stakeholder* yang dikoordinasikan/disetujui oleh BPPSDM.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Revisi November 2023 target IKK ini ditetapkan sebanyak 3 Naskah Kerjasama. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Capaian IKK Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang Disepakati (Naskah Kerjasama)

SK-1			Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan					
IKK-2			Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang Disepakati (Naskah Kerjasama)					
Realisasi 2020 - 2022			2023				Renstra Pusriskel 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
31	27	-	3	4	120	-	30	13,33

Pada Tahun 2023 capaian IKK ini telah melebihi target yang ditetapkan, yakni tercapai 4 kerjasama/kemitraan dari target 3 kerjasama/kemitraan yang disepakati, dengan persentase capaian sebesar 133,33%, namun karena nilai maksimal pada Aplikasi Kinerjaaku adalah 120% maka persentase capaian IKK ini adalah 120%.

Capaian IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tidak terdapat indikator kinerja ini pada Tahun 2022. Terdapat perubahan target pada tahun 2023 karena yang diukur hanya

kerjasama yang disepakati pada tahun 2023, berbeda dengan target tahun-tahun sebelumnya dimana yang diukur adalah kerjasama yang disepakati dan ditindaklanjuti dari tahun sebelumnya. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Pusriskel 2020-2024 sebesar 30 realisasi tersebut telah mencapai 13,33%.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Pusat Riset Perikanan persentase capaian IKK ini sama yakni sebesar 120% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah.

Tabel 15. Perbandingan Capaian IKK Kemitraan/Kerjasama dengan Satker Pusriskan

Satker	Target	Realisasi	%
Pusriskel	3	4	120
Pusriskan	30	33	120

Keberhasilan capaian IKK ini disebabkan oleh adanya komitmen pimpinan untuk menjalin kemitraan dan jejaring dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan prioritas dan diseminasi hasil kegiatan lingkup Pusriskel.

Tabel 16. Mitra Kerjasama Lingkup Pusriskel Tahun 2023

No.	Jenis Kerjasama/ Kemitraan	Mitra	Nomor	Tentang
1.	Nota Kesepakatan	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	5/BRSDM/KKP/KB/III/2023 dan 1881.45/001/BUP-PASBAR/2023	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pasaman Barat
2.	PKS	Balai Taman Nasional Wakatobi (BTN Wakatobi)- KLHK	11/BRSDM/KKP/PKS/IV/2023 dan PKS.665/T.21/TU/KP/04/KP	Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam dan Konservasi Keanekaragaman Hayati melalui Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Pemulihan Ekosistem Terumbu Karang dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir pada Wilayah Kerja Balai Taman Nasional Wakatobi
3.	PKS	Universitas Pasifik Morotai	11/BPPSDM/KKP/PKS/XI/2023 dan PKS.665/T.21/TU/KP/04/KP	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi dalam rangka Pembangunan

No.	Jenis Kerjasama/ Kemitraan	Mitra	Nomor	Tentang
				Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan
4.	PKS	Universitas Bung Hatta	74/BPPSDM/KKP/PKS/XII/2023 dan 525/UM/FPIK/XI-2023	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi dalam rangka Pembangunan Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan

Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja ini adalah menyelenggarakan pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi melalui kegiatan *Smart Fisheries Village* (SFV) Desa dan UPT, yakni SFV Desa Jorong Sikabau Nagari Ranah Koto Tinggi di Kabupaten Pasaman Barat, SFV UPT Usaha Garam Rakyat di Pamekasan, SFV UPT Teknologi Kelautan di Wakatobi. Disamping kegiatan SFV capaian indikator kinerja ini juga didukung dengan kegiatan penyerahan bantuan WakatobiAIS kepada nelayan perairan Wakatobi dan Pelaksanaan Seminar Nasional dengan tema "Karbon Biru: Potensi dan Tantangan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Terluar di Gerbang Pasifik Indonesia" kerjasama dengan Universitas Pasifik Morotai.

Pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi pada kegiatan SFV Desa Jorong Sikabau Nagari Ranah Koto Tinggi di Kabupaten Pasaman Barat diantaranya adalah Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pengurangan Resiko Bencana, Pelatihan Pengembangan dan pengelolaan ekowisata bahari berbasis masyarakat, Pelatihan Pembesaran Udang dan Lobster, dan Pelatihan Pembuatan Alat Tangkap Ramah Lingkungan Jenis Jaring Insang (Gillnet). Di Pamekasan dilaksanakan Pelatihan Pengolahan Garam Sistem Mekanis dan Sistem Rekristal, Pendampingan akses pemodalan dan pengelolaan keuangan UMKM, Pendampingan legalitas ijin edar dan merek produk olahan garam, serta sertifikasi produk pengolahan garam. Pada kegiatan SFV UPT Teknologi Kelautan di Wakatobi dilaksanakan juga pelatihan dan penyuluhan perikanan diantaranya Pelatihan pelampung budidaya rumput laut ramah

lingkungan dari batok kelapa dan Pelatihan Seleksi Varietas bibit unggul rumput laut. Disamping itu dilaksanakan pula *Training of Trainer* (TOT) Wahana Keselamatan dan Pemantauan Objek Berbasis *Automatic Identification System* dan TOT Implementasi Dashboard Kios Maritim.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 92.470.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp. 90.310.639,- atau sebesar 97,66%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 22,34%.

IKK 3: Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)

Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan meliputi Kegiatan Layanan Tata Laksana, Kegiatan Layanan Kesekretariatan Pimpinan, Kegiatan Layanan Perkantoran, Kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, serta Kegiatan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan yang dilaksanakan pada tahun 2023.

$$\text{Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal} = \frac{\text{Jumlah realisasi dokumen hasil layanan}}{\text{Jumlah target dokumen hasil layanan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Revisi November 2023 target IKK ini ditetapkan sebesar 100%. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Capaian IKK Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)

SK- 1		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan						
IKK- 3		Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Riset Kelautan (%)						
Realisasi 2020 - 2022			2023				Renstra Pusriskel 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
-	100	100	100	100	100	-	100	100

Pada Tahun 2023 capaian IKK ini telah mencapai target yang ditetapkan yakni 100%, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Tidak terdapat kenaikan atau penurunan capaian pada IKK ini bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 dikarenakan target dan capaian IKK ini tetap sama pada tahun 2020-2022. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Pusriskel 2020-2024 sebesar 100 realisasi tersebut telah mencapai 100%.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Pusat Pelatihan dan Penyuluhan persentase capaian IKK ini sama yakni sebesar 100% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah.

Tabel 18. Perbandingan Capaian IKK Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan Satker Puslatluh

Satker	Target	Realisasi	%
Pusriskel	100	100	100
Puslatluh	100	100	100

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh adanya pembagian tugas yang jelas yang tertuang dalam Matriks Peran Hasil (MPH) yang menjadi panduan segenap pegawai. Selain itu para Ketua dan anggota Timja memiliki komitmen kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tabel 19. Rekap Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Tahun 2023

No.	Laporan Layanan Dukungan Manajemen	Target 2023	Capaian 2023	% capaian
1.	Kegiatan Layanan Tata Laksana (Triwulan I - IV)	4	4	100
2.	Kegiatan Layanan Kesekretariatan Pimpinan (Triwulan I - IV)	4	4	100
3.	Kegiatan Layanan Perkantoran (Triwulan I - IV)	4	4	100
4.	Kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (Triwulan I - IV)	4	4	100
5.	Kegiatan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (Triwulan I - IV)	4	4	100
TOTAL		20	20	100

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah melaksanakan Kegiatan Tata Laksana diantaranya pengelolaan kegiatan

BMN mulai dari peroleh sampai ke penghapusan/pemindahtanganan dan penyusunan RKBMN 2024, Kegiatan Kesekretariatan Pimpinan meliputi kunjungan kerja dan lapangan Kepala Pusat Riset Kelautan untuk memantau kinerja output Pusat Riset Kelautan serta perjalanan mandatory sesuai Disposisi Kepala BPPSDM KP, Kegiatan Operasional Perkantoran yang terdiri dari pelayanan, pengiriman, penyediaan, pemeliharaan dan sewa mesin yang meliputi perencanaan, pendokumentasian (geotagging), pencatatan dan pelayanan pegawai, pengadaan dan pemeliharaan. Pada kegiatan pengadaan barang dan jasa secara rutin melakukan revisi maupun revidu terhadap Rencana Kegiatan Pengadaan yang dicatat di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) setiap awal bulan, sedangkan kegiatan pengelolaan kearsipan telah dilaksanakan penanganan surat yang cepat dan tepat dengan menerapkan sistem aplikasi yang terintegrasi di setiap pengelola/bagian/staf persuratan bahkan hingga seluruh pejabat.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 30.064.744.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp. 29.582,590.769,- atau sebesar 98,40%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,60%.

IKK 4: Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK satker merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Pusat Riset Kelautan atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan

Kuangan KKP Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran Pusat Riset Kelautan tahun 2022.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Revisi November 2023 target IKK ini ditetapkan sebesar 100%. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Capaian IKK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan (%)

SK- 1		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan						
IKK- 4		Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan (%)						
Realisasi 2020 - 2022			2023				Renstra Pusriskel 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
1,47	0	0	≤0,5	0	120	-	≤1	120

Pada Tahun 2023 capaian IKK ini telah melebihi target yang ditetapkan yakni 0%, dengan persentase capaian sebesar 120%.

Tidak terdapat kenaikan atau penurunan capaian bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022, dikarenakan pada Tahun 2022 tidak terdapat temuan pada Pusriskel. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Pusriskel 2020-2024 sebesar ≤1 realisasi tersebut telah mencapai 120%.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Pusat Pendidikan persentase capaian IKK ini sama yakni sebesar 120% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah.

Tabel 21. Perbandingan Capaian IKK Batas tertinggi persentase temuan LHP BPK dengan Satker Pusdik

Satker	Target	Realisasi	%
Pusriskel	≤ 0,5	0	120
Pusdik	≤ 0,5	0	120

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan adanya sistem pengendalian internal yang baik di lingkungan Pusriskel sehingga tidak terdapat temuan pada tahun ini. Selain itu, keberhasilan ini juga disebabkan karena pelaksanaan kegiatan Pusriskel sudah sesuai peraturan pengelolaan anggaran yang berlaku. Nilai capaian IKK ini sesuai dengan

sesuai Surat Dinas dari Sekretaris BRSDM KP Nomor B.6509/BRSDM.1/HP.520/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”.

Tabel 22. Nilai IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK RI atas LK BRSDM TA 2022.

No.	SATKER	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Temuan Nilai Kepatuhan	Nilai IKU (Temuan/ Realisasi)	Ket
1.	Pusriskan (SATU DIPA)	37.720.785.000	37.261.765.391	0	0	≤1%
2.	LRSDKP	4.808.489.000	4.799.604.377	0	0	≤1%
3.	LPTK	3.492.526.000	3.483.590.091	0	0	≤1%
TOTAL		31.235.000.000		0	0	

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah penyelesaian temuan tahun sebelumnya, penyusunan Laporan Keuangan secara tepat waktu yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penyelesaian catatan reviu laporan keuangan dan rekonsiliasi data BMN.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 113.976.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp. 113.052.258,- atau sebesar 99,19%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 20,81%.

IKK 5: Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN

dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin.

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir;
3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan Perilaku kerja;
4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. Kinerja memiliki bobot 30 % (tiga puluh persen); dan
- d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Revisi November 2023 target IKK ini ditetapkan nilai sebesar 78. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Capaian IKK Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset kelautan (Indeks)

SK-1		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan						
IKK-5		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)						
Realisasi 2020 - 2022			2023				Renstra Pusriskel 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
76,73	83,97	85,16	78	91,24	116,97	7,14	72	120 (126,72)

Pada Tahun 2023 capaian IKK ini telah melebihi target yang ditetapkan, yakni tercapai nilai indeks sebesar 91,24 dari target yang ditetapkan sebesar 78, dengan persentase capaian sebesar 116,97%.

Terdapat peningkatan capaian sebesar 7,14% bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 dikarenakan adanya peningkatan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan kinerja seluruh pegawai Pusat Riset Kelautan pada tahun 2023. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Pusriskel 2020-2024 sebesar 72 realisasi tersebut telah mencapai maksimal 120% (126,72%).

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Pusat Riset Perikanan sebesar 116,37% persentase capaian IKK ini lebih tinggi 0,60% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah.

Tabel 24. Perbandingan Capaian IKK IP ASN dengan Satker Pusriskan

Satker	Target	Realisasi	%
Pusriskel	78	91,24	116,97
Pusriskan	78	90,77	116,37

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh keterlibatan dan keaktifan seluruh pegawai dalam melaksanakan updating kualifikasi pendidikan dan kegiatan pengembangan kompetensi pada aplikasi kepegawaian serta dukungan masing-masing komponen penilaian meliputi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pegawai Pusriskel. Selain itu, keberhasilan tersebut juga disebabkan oleh adanya kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang bersifat *online*. Nilai capaian IKK ini sesuai dengan Surat Dinas dari Sekretaris BRSDM KP Nomor B.222/BPPSDM.1/TU.210/I/2024 Tanggal 10 Januari 2023 Tentang Capaian IP ASN Tahun 2023.

Tabel 25. Rekap Nilai IP ASN Pusat Riset Kelautan Tahun 2023

No.	Komponen	Bobot	Nilai IP
1.	Kualifikasi	25	21,96
2.	Kompetensi	40	39,53
3.	Kinerja	30	25
4.	Disiplin	5	4,76
TOTAL		100	91,24

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah pelaksanaan Pengisian Data Mandiri (PDM) pada sistem kepegawaian Nasional MySAPK.bkn.go.id. dengan mengisi data dasar kepegawaian masing-masing ASN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pengisian e-SKP pegawai sebagai bukti kinerja, dan keaktifan seluruh pegawai dalam memberikan data terkini kepada bagian kepegawaian, serta pemantauan disiplin ASN.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 142.209.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp. 141.008.009,- atau sebesar 99,16%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 116,97% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 17,81%.

IKK 6: Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Kelautan (Nilai)

Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon II di lingkungan KKP.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan revisi November 2023 target IKK ini ditetapkan nilai sebesar 75. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Capaian IKK Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Kelautan (Nilai)

SK- 1		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan						
IKK- 6		Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Kelautan (Nilai)						
Realisasi 2020 - 2022			2023				Renstra Pusriskel 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
-	-	-	75	80,35	107,13	-	-	-

Pada Tahun 2023 capaian IKK ini telah melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 80,35 dari target yang ditetapkan sebesar 75, dengan persentase capaian sebesar 107,13%.

Capaian IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 karena merupakan IKK baru pada tahun 2023. Capaian indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra Pusriskel 2020-2024 karena belum dituangkan dalam Renstra Pusriskel 2020-2024, karena merupakan IKK baru pada tahun 2023.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Pusat Riset Perikanan sebesar 106,45% persentase capaian IKK ini lebih tinggi 0,68% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah.

Tabel 27. Perbandingan Capaian IKK PM SAKIP dengan Satker Pusriskan

Satker	Target	Realisasi	%
Pusriskel	75	80,35	107,13
Pusriskan	76	80,9	106,45

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh terlaksananya kegiatan penataan dokumen SAKIP Pusriskel periode 5 tahun (2019-2023) dan Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Kelautan melalui kegiatan evaluasi atas implementasi SAKIP. Nilai capaian IKK ini sesuai dengan Surat Dinas dari Sekretaris BRSDM KP Nomor B.3352/BRSDM.1/RC.510/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level II Lingkup BRSDM.

Tabel 28. Nilai Komponen PM SAKIP Pusriskel Tahun 2023

No.	Komponen	Bobot (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,30
2.	Pengukuran Kinerja	30	23,70
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,85
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,50
TOTAL		100	80,35

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini diantaranya adalah:

1. Penyusunan dokumen kinerja 2023, yakni Perjanjian Kinerja 2023, Reviu Renstra 2023, Renja 2023, DIPA/RKAK/L 2024, dan Rencana Kinerja 2024;
2. Pengukuran dan Pelaporan Kinerja, yakni Reviu LKj 2022, Pengumpulan bukti capaian, Pengukuran Kinerja 2023, Penyusunan LKJ 2023 dan Penyampaian LKJ;
3. Evaluasi kinerja, yakni Tindaklanjut rekomendasi LKJ, tindak Lanjut Rencana Aksi, Evaluasi SAKIP dan Tindak Lanjut Rekomendasi LHE SAKIP;
4. Evaluasi Penilaian Mandiri dari hasil Penilaian Mandiri SAKIP pada Aplikasi DSMS BRSDM.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 272.340.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp. 268.154.561,- atau sebesar 98,46%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 107,13% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,67%.

IKK 7: Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (Nilai)

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 4 (empat) aspek yaitu:

- a) Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IK, Rincian Target IK, Renaksi, LKj/LCK TW I s.d III dan data dukung LKj/LCK TW III;
- b) Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data;
- c) Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IK + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2023 pada aplikasi kinerjaku;
- d) Aspek Ketepatan (A-IV): Aspek Ketepatan dilakukan dengan melihat ketepatan waktu pengiriman LKj pada Aplikasi ESR KemenPAN RB dan penyampaian resmi kepada atasan langsung.

Nilai Rekonsiliasi Kinerja adalah skoring kertas kerja rekonsiliasi yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Revisi November 2023 target IKK ini ditetapkan sebesar 93 Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29. Capaian IKK Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (Nilai)

SK- 1		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan						
IKK- 7		Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (Nilai)						
Realisasi 2020 - 2022			2023				Renstra Pusriskel 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
-	98,68	98,52	93	96,49	103,75	-2,06	-	-

Pada Tahun 2023 capaian IKK ini telah melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 96,49 dari target yang ditetapkan sebesar 93, dengan persentase capaian sebesar 103,75%.

Terdapat penurunan capaian sebesar 2,06% bila dibandingkan dengan nilai capaian tahun 2022 yang disebabkan oleh turunnya rata-rata nilai kinerja organisasi (NKO) pada tahun 2023. Capaian indikator kinerja

ini belum dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra Pusriskel 2020-2024 karena belum dituangkan dalam Renstra Pusriskel 2020-2024. IKK Nilai Rekonsiliasi Kinerja merupakan IKK baru pada tahun 2021.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Pusat Riset Perikanan sebesar 104,66% persentase capaian IKK ini lebih rendah 0,91% sebagaimana pada tabel dibawah.

Tabel 30. Perbandingan Capaian IKK Rekonsiliasi Kinerja dengan Satker Pusriskan

Satker	Target	Realisasi	%
Pusriskel	93	96,49	103,75
Pusriskan	93	97,33	104,66

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh telah lengkap dan tersedianya dokumen-dokumen dan data yang dibutuhkan pada penilaian. Nilai capaian IKK ini sesuai dengan Surat Dinas dari Sekretaris BRSDMKP Nomor B.7354/BRSDM.1/RC.510/XI/2023 Tanggal 24 November 2023 perihal Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Kinerja Level II di Lingkungan BPPSDM Tahun 2023.

Tabel 31. Nilai Komponen PM SAKIP Pusriskel Tahun 2023

No.	Aspek	Bobot (%)	Nilai
1.	Kepatuhan	25	25
2.	Kesesuaian	25	25
3.	Ketercapaian	30	26,49
4.	Ketepatan	20	20
TOTAL		100	96,49

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini diantaranya adalah:

1. Menyampaikan secara resmi LKJ Tahun 2022 kepada Kepala BRSDM (surat pengantar);
2. Meng-upload dokumen SAKIP revisi April 2023 (PK, Renaksi, Rician Target IKU, LHE, SKP) ke Aplikasi ESR KemenPAN RB dalam rangka memenuhi permintaan bahan sebagai Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN RB;

3. Melakukan reviu atas kelengkapan aspek penilaian rekonsiliasi kinerja, meliputi kelengkapan dokumen revisi terakhir (Revisi PK, Manual IKU, Rencana Aksi, dan Rincian Target IKU), kesesuaian narasi dan target kinerja, serta dokumentasi penyampaian laporan kinerja kepada atasan langsung;
4. Melakukan pengisian mandiri Kertas Kerja Rekonsiliasi kinerja untuk dievaluasi.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 59.117.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp. 58.854.082,- atau sebesar 99,56%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 103,75% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,19%.

IKK 8: Persentase Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan terstandar yang diimplementasikan di lingkup KKP pada Triwulan I dan II tahun 2023 menggunakan Aplikasi kinerja *bitrix24.com*.

- a) Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Bitrix24*;
- b) Komponen yang diunggah pada aplikasi *Bitrix24* diantaranya Laporan Kinerja Per Triwulan.
- c) Bobot Komponen Keaktifan diantaranya:
 - Konten dokumentasi **tulisan kegiatan** rapat/seminar/workshop/ diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan **point 0,5**;
 - Konten berupa karya **infografis point 1**;
 - Konten berupa **Jurnal/video/campaign** diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan **point 3**.

Sistem Manajemen Pengetahuan terstandar yang diimplementasikan di lingkup UPT BPPSDM pada Triwulan III* dan IV Tahun 2023 diantaranya:



- a) Menggunakan Aplikasi *Collaboration Office* dengan alamat **portal.kkp.go.id**;
- b) Penghitungan keaktifan dilakukan setiap satu triwulan dengan komposisi mendapatkan **4 poin**;
- c) Bobot nilai keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan sama dengan di TW I dan II.

Cara mengukur capaian pada Triwulan I dan II:

- a) Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (bitrix);
- b) Menilai dua Komponen Dokumen (20%) dan Komponen Keaktifan (80%);
- c) Pengukuran level 3 dihitung dengan lingkup UPT BRSDM (**Kepala UPT Lingkup BRSDM**).

TW I dan TW II MP_{unit Level 2} = Nilai Pemenuhan Dokumen + Nilai Keaktifan

Hasil capaian pada TW II merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I dan II

Cara mengukur capaian pada **TW III* dan IV:**

- a) Menggunakan Aplikasi Manajemen pengetahuan dengan (*collaboration office*) portal.kkp.go.id
- b) Nilai maksimal komponen Keaktifan 4 poin
- c) Pengukuran level 3 dihitung dengan lingkup UPT BRSDM (**Kepala UPT Lingkup BRSDM**)

TW III* dan TW IV MP_{Unit Level 2} = Nilai Keaktifan / Target * 100%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Revisi November 2023 target IKK ini ditetapkan sebesar 92 Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 32. Capaian IKK Persentase Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandard (%)

SK- 1		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan						
IKK- 8		Persentase Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandard (%)						
Realisasi 2020 - 2022			2023				Renstra Pusriskel 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
99	97,45	99,94	92	116,58	120	16,64	82	120 (142,17)

Pada Tahun 2023 capaian IKK ini telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu 116,58% dari target yang ditetapkan sebesar 92%, dengan persentase capaian sebesar 126,72%, namun karena nilai maksimal pada aplikasi Kinerjaku adalah 120% maka persentase capaian IKK ini adalah 120%.

Terdapat kenaikan capaian sebesar 16,64% bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 disebabkan adanya upaya monitoring penyampaian informasi yang dilaksanakan secara kontinyu dan tepat waktu sesuai target oleh Kepala Satker dan Ketua Tim Kerja Pusriskel. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Pusriskel 2020-2024 sebesar 82 realisasi tersebut telah mencapai maksimal 120% (142,17%).

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Pusat Riset Perikanan persentase capaian IKK ini sama yakni sebesar 120% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah.

Tabel 33. Perbandingan Capaian IKK MP dengan Satker Pusriskan

Satker	Target	Realisasi	%
Pusriskel	92	116,58	120
Pusriskan	92	116,58	120

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh pemanfaatan sistem informasi (SI) atau media sosial dalam penyampaian/posting informasi, berita dan kegiatan baik riset maupun manajerial di lingkungan KKP pada Aplikasi Bitrix24 pada Triwulan I dan II, sedangkan pada Triwulan III dan IV pada Aplikasi Manajemen

Pengetahuan (collaboration office) portal.kkp.go.id pada Tahun 2023. Nilai capaian IKK ini sesuai dengan Surat Dinas dari Sekretaris BRSDMKP Nomor B.90/BPPSDM.1/TU.210/1/2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal Capaian Nilai Akhir IKU MP Terstandar Lingkup KKP.

Tabel 34. Rekap Nilai MP Pusriskel Tahun 2023

No.	Jabatan	Target TW IV	Realisasi TW IV	%
1.	Kepala Pusriskel	3	4	133
2.	Ketua Tim SDM AU	3	4	133
3.	Ketua Tim Keuangan	3	4	133
4.	Ketua Tim Program	3	4	133
5.	Ketua Tim Pelayanan Teknik	3	4	133
TOTAL		15	20	133
Rata-Rata Tahun 2023 (TW1+TW2+TW3+TW4)/4		(100+100+133+133)/4		116,58

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah keaktifan Kepala Satker/Kepala Pusriskel dan Ketua Tim Kerja Pusriskel dalam membagikan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pusriskel pada SI-MP tersebut pada periode Januari-Desember 2023 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 190.431.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp. 188.274.074,- atau sebesar 98,87%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 21,13%

IKK 9: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Kelautan (%)

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Pusat Riset Kelautan.

Formula perhitungan IKK ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Pusat Riset Kelautan}} \times 100\%$$

Berdasarkan revisi Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Revisi November 2023 target IKK ini ditetapkan sebesar 80%. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35. Capaian IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Kelautan (%)

SK- 1		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan						
IKK- 9		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Kelautan (%)						
Realisasi 2020 - 2022			2023				Renstra Pusriskel 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
57,89	89,47	100	80	80	100	-20	-	-

Pada Tahun 2023 capaian IKK ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni 80% rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan dari target 80%, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 terdapat penurunan capaian sebesar 20% dikarenakan adanya perubahan dalam penyampaian nilai capaian, namun secara nilai capaian tidak terdapat penurunan capaian. Capaian indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra Pusriskel 2020-2024 karena belum dituangkan dalam Renstra Pusriskel 2020-2024.

Pada tahun 2022 nilai capaian semua satuan kerja yang sudah tuntas tindak lanjutnya ataupun satuan kerja yang tidak ada temuan adalah sama yakni 100%. Pada tahun 2023 terjadi pembedaan dimana nilai capaian suatu satuan kerja yang menjadi uji petik Itjen dan sudah tuntas tindak lanjutnya adalah 100% serta nilai capaian suatu satuan kerja yang tidak ada temuan adalah sama dengan target kinerja yang ditetapkan yakni 80%.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Pusat Pendidikan sebesar 120% persentase capaian IKK ini lebih rendah 20% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah.

Tabel 36. Perbandingan Capaian IKK Persentase rekomendasi pengawasan dengan Satker Pusdik

Satker	Target	Realisasi	%
Pusriskel	80	80	100
Pusdik	80	100	120

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan Nilai capaian IKK ini sesuai dengan surat dari Sekretaris BRSDM Nomor B.292/BPPSDM.1/RC.610/I/2024 tanggal 14 Januari 2024 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup BPPSDM KP Triwulan IV Tahun 2023”.

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini inisiasi kegiatan seperti tindak lanjut temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan Tim ITJEN KKP, melakukan koordinasi dengan Itjen KKP sebagai mitra, dan aktif dalam memantau perkembangan tindak lanjut temuan pada Aplikasi SIDAK.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 32.933.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp. 32.156.834,- atau sebesar 97,64%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,36%.

IKK 10: Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Pusat Riset Kelautan (Inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang

merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Revisi November 2023 target IKK ini ditetapkan sebanyak 1 inovasi. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 37. Capaian IKK Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Pada Unit Kerja Pusat Riset Kelautan (Inovasi)

SK- 1			Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan					
IKK- 10			Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Pusat Riset Kelautan (Inovasi)					
Realisasi 2020 - 2022			2023				Renstra Pusriskel 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
-	-	1	1	1	100	100	-	-

Pada Tahun 2023 capaian IKK ini telah mencapai target yang ditetapkan yakni tercapai 1 (satu) Inovasi yang diterapkan dari target 1 (satu) inovasi dengan persentase capaian sebesar 100%.

Tidak terdapat peningkatan ataupun penurunan capaian bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 karena target capaian tahun 2022 sama dengan target 2023. Capaian indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra Pusriskel 2020-2024 karena belum dituangkan dalam Renstra Pusriskel 2020-2024, karena merupakan IKK baru pada tahun 2022.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Pusat Pendidikan persentase capaian IKK ini sama yakni sebesar 100% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah.

Tabel 38. Perbandingan Capaian IKK Pelayanan Publik dengan Satker Pusdik

Satker	Target	Realisasi	%
Pusriskel	1	1	100
Pusdik	1	1	100

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh telah adanya produk IPTEK kelautan sebagai bahan usulan pelayan publik yang telah dimanfaatkan oleh *stakeholder* di pesisir perairan Wakatobi. Nilai capaian IKK ini sesuai dengan surat dari Plh. Kepala Pusat Riset Kelautan Nomor 412/BPPSDM.2/RC.610/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 tentang Proposal Inovasi Pelayanan Publik SFV-MarInfo.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian ini adalah pendampingan UPT untuk melaksanakan penilaian Mandiri dalam PEPKPPP, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), penyusunan laporan Pelayanan Publik, dan pendampingan UPT yang memasukkan usulan tambahan produk layanan publiknya dalam revisi produk BPPSDM KKP di lampiran Kepmen 54 Tahun 2022, serta pendampingan UPP untuk monitoring evaluasi layanan publik (PEKPPP) dan pengelolaan media sosial Pusat Riset Kelautan.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp. 69.747.333,- atau sebesar 99,64%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,36%.

IKK 11: Indikator Kinerja Pelaksanan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)

IKPA merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu Revisi DIPA (10%), Devisiasi RPD (10%), Penyerapan

Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (5%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (25%).

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain: (a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; (b) Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ; (c) Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau (d) Kurang, apabila nilai IKPA > 70 .

Formula perhitungan:

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai;
- Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobor Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Revisi November 2023 target IKK ini ditetapkan sebesar 93,75. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 39. Capaian IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)

SK- 1		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan						
IKK- 11		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)						
Realisasi 2020 - 2022			2023				Renstra Pusriskel 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
93,84	-	-	93,75	90,98	97,05	-	88	103,39

Pada Tahun 2023 capaian IKK ini belum mencapai target yang ditetapkan yakni tercapai nilai 90,98 dari target 93,75 dengan persentase capaian sebesar 97,05%. Capaian IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 karena tidak terdapat target capaian pada tahun

sebelumnya. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Pusriskel 2020-2024 sebesar 88 realisasi tersebut telah mencapai 103,39%.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Sekretariat BPPSDM, 100,32% persentase capaian IKK ini lebih rendah 3,27% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah.

Tabel 40. Perbandingan Capaian IKPA dengan Satker Sekretariat BPPSDM

Satker	Target	Realisasi	%
Pusriskel	93,75	90,98	97,05
Set. BPPSDM	93,75	94,05	100,32

Kegagalan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh target Halaman III DIPA tidak sesuai perencanaan disebabkan adanya blokir anggaran serta inkonsistensi penyerapan anggaran, dimana sebagian besar pelaksanaan kegiatan kontraktual terkonsentrasi di TW IV menyebabkan realisasi anggaran per triwulan lebih rendah dari target yang ditetapkan oleh Kemenkeu sehingga mengakibatkan realisasi pada IKPA rendah. Atas kegagalan ini disarankan agar periode tahun berikutnya sebagian besar kegiatan kontraktual secepatnya dilaksanakan pada triwulan I dan II. Nilai capaian IKK ini sesuai dengan surat dari Kepala Biro Keuangan Nomor 100/SJ.2/TU.210/I/2024 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV Tahun 2023.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian ini adalah kegiatan rekonsiliasi data realisasi, data capaian volume dan data progress fisik. Selain itu juga telah dilakukan revisi target capaian output pada TW III dan TW IV.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 53.724.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp. 53.663.650,- atau sebesar 99,89%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 97,05% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar -2,84%.

IKK 12: Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya terhadap perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- Baik, apabila NKA >80 - 90;
- Cukup, apabila NKA >60 - 80;
- Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Revisi November 2023 target IKK ini ditetapkan sebesar 82. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 41. Capaian IKK Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)

SK-1		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan						
IKK-12		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)						
Realisasi 2020 - 2022			2023				Renstra Pusriskel 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
-	-	-	82	85,96	104,83	-	-	-

Pada Tahun 2023 capaian IKK ini telah mencapai target yang ditetapkan yakni tercapai nilai 85,96 dari target 82 dengan persentase capaian sebesar 104,83%.

Capaian IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 karena tidak terdapat target capaian pada tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra Pusriskel 2020-2024 karena belum dituangkan dalam Renstra Pusriskel 2020-2024, karena merupakan IKK baru pada tahun 2023.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Sekretariat BPPSDM, 107,87% persentase capaian IKK ini lebih rendah 3,04% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah.

Tabel 42. Perbandingan Capaian NKA dengan Satker Sekretariat BPPSDM

Satker	Target	Realisasi	%
Pusriskel	82	85,96	104,83
Set. BPPSDM	86	92,77	107,87

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh adanya konsistensi dalam melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) terhadap realisasi anggaran pada setiap periode triwulan. Selain itu juga adanya koordinasi yang baik dengan operator Aplikasi Sakti dan bendahara pengeluaran dalam penginputan data kinerja anggaran. Nilai capaian IKK ini sesuai dengan surat dari Kepala Biro Keuangan Nomor 84/SJ.2/RC.610/I/2024 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Triwulan IV Tahun 2023.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian ini adalah kegiatan rekonsiliasi data realisasi, data capaian volume dan data progress fisik kegiatan. Selain itu juga telah dilakukan revisi target capaian output pada TW III dan TW IV.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 58.155.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar

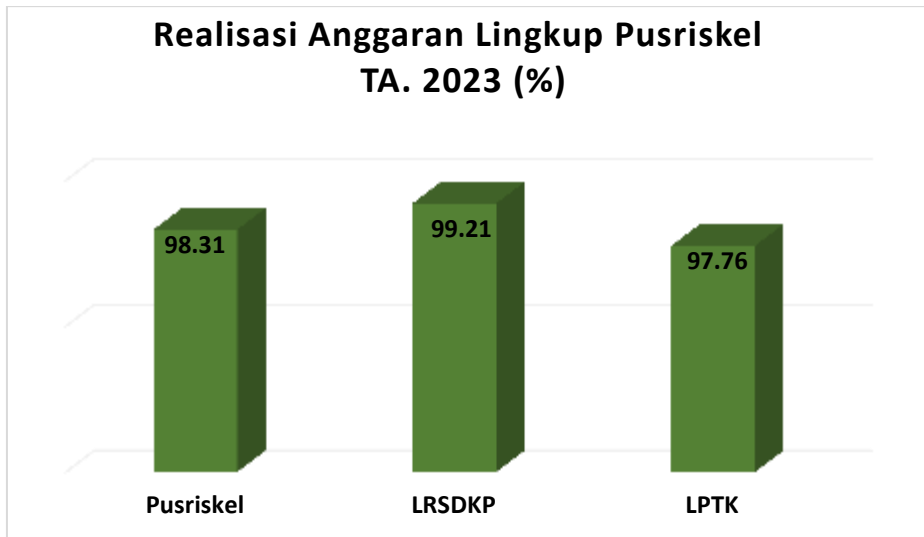
Rp. 57.678.853,- atau sebesar 99,18%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 104,83% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,65%.

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023

Penyerapan anggaran lingkup Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 data per tanggal 5 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 30.738.991.082,- dari pagu anggaran revisi November sebesar Rp. 31.235.000.000,- atau sebesar 98,41%. Rincian realisasi anggaran tersebut sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 43. Rincian Realisasi Anggaran Lingkup Pusriskel Tahun 2023

Satuan Kerja (Satker)	Pagu (Rp)	Realisasi	
		Rp.	%
Pusriskel	20,522,649,000	20,175,194,643	98.31%
LRSDKP	6,279,852,000	6,230,505,714	99.21%
LPTK	4,432,499,000	4,333,290,725	97.76%
TOTAL	31,235,000,000	30,738,991,082	98.41%



Gambar 11. Realisasi Anggaran Lingkup Pusriskel Tahun 2023

Secara umum kinerja pengelolaan anggaran lingkup Pusat Riset Kelautan pada Tahun 2023 sudah baik. Capaian realisasi anggaran lingkup Pusat Riset Kelautan sebesar 98,41% apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 98,50% maka persentase capaiannya adalah 99,91%.

Kinerja anggaran per Sasaran Kegiatan dan per IKK dapat diketahui dari capaian realisasi anggaran setiap Sasaran Kegiatan dan IKK. Capaian realisasi anggaran per IKK dan per Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 44. Rincian Realisasi Anggaran Pusriskel Per IKK Tahun 2023

Indikator Kinerja		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1.	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	84,901,000	83,500,020	98.35%
2.	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	92,470,000	90,310,639	97.66%
3.	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	30,064,744,000	29,582,590,769	98.40%

Indikator Kinerja		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
4.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Pusat Riset Kelautan (%)	113,976,000	113,052,258	99.19%
5.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (indeks)	142,209,000	141,008,009	99.16%
6.	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	272,340,000	268,154,561	98.46%
7.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	59,117,000	58,854,082	99.56%
8.	Persentase unit kerja Pusat Riset Kelautan yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	190,431,000	188,274,074	98.87%
9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Kelautan (%)	32,933,000	32,156,834	97.64%
10.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Pusat Riset Kelautan (Inovasi)	70,000,000	69,747,333	99.64%
11.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (nilai)	53,724,000	53,663,650	99.89%
12.	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (nilai)	58,155,000	57,678,853	99.18%
TOTAL		31,235,000,000	30,738,991,082	98.41%

Tabel 45. Rincian Realisasi Per Sasaran Kegiatan Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran Per 5 Januari 2024 (Rp.)	%
1.	Tatakelola Pemerintahan yang Baik pada Pusat Riset Kelautan	31.235.000.000	30.738.991.082	98,41
TOTAL		31.235.000.000	30.738.991.082	98,41

D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya

Pusat Riset Kelautan merupakan satuan kerja di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat perencana untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Nilai efisiensi tertinggi adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah

-20% (minus dua puluh persen). Nilai efisiensi anggaran Pusat Riset Kelautan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 46. Perhitungan Efisiensi Anggaran Pusat Riset Kelautan

Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)	
Sasaran Kegiatan 1: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan								
1	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	29	43,35	120.00%	84,901,000	83,500,020	98.35%	21.65%
2	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3	4.00	120.00%	92,470,000	90,310,639	97.66%	22.34%
3	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100	100.00%	100.00%	30,064,744,000	29,582,590,769	98.40%	1.60%
4	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Pusat Riset Kelautan (%)	≤ 0,5	0.00%	120.00%	113,976,000	113,052,258	99.19%	20.81%
5	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (indeks)	78	91,24	116.97%	142,209,000	141,008,009	99.16%	17.81%
6	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75	80,35	107.13%	272,340,000	268,154,561	98.46%	8.67%
7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	93	96,49	103.75%	59,117,000	58,854,082	99.56%	4.19%
8	Persentase unit kerja Pusat Riset Kelautan yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	92	116,58%	120.00%	190,431,000	188,274,074	98.87%	21.13%
9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Kelautan (%)	80	80.00%	100.00%	32,933,000	32,156,834	97.64%	2.36%
10	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Pusat Riset Kelautan (Inovasi)	1	1.00	100.00%	70,000,000	69,747,333	99.64%	0.36%
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (nilai)	93,75	90,98	97.05%	53,724,000	53,663,650	99.89%	-2.84%
12	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (nilai)	82	85,96	104.83%	58,155,000	57,678,853	99.18%	5.65%
TOTAL				109.55%	31,235,000,000	30,738,991,082	98.41%	11.14%

Berdasarkan tabel diatas, efisiensi anggaran Pusat Riset Kelautan pada Tahun 2023 sebesar 11,14%. Efisiensi menunjukkan perolehan positif dari rentang nilai efisiensi +20% sampai dengan -20%, sedangkan nilai efisiensi diperoleh dari transformasi skala efisiensi. Kondisi efisiensi

dipengaruhi atas penggunaan anggaran dengan penyerapan anggaran sebesar 98,01% dengan capaian tingkat output kegiatan sebesar 100%.

Terdapat beberapa output dengan capaian 120%, yaitu:

- a) Nilai PNBSP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan mencapai **43,35** Juta Rupiah dari target sebesar **29** Juta Rupiah;
- b) Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati mencapai **4** Naskah Kerjasama dari target sebesar **3** Naskah Kerjasama;
- c) Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan mencapai **0%** dari target sebesar **≤0,5%**;
- d) Persentase Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar mencapai **116,58%** dari target nilai sebesar **92**;

Halaman Kosong





BAB IV PENUTUP

A. Capaian Kinerja Utama

B. Permasalahan & Rekomendasi



A. Capaian Kinerja Utama

Berdasarkan hasil pengukuran Aplikasi Kinerjajaku Tahun 2023, Pusat Riset Kelautan memiliki kinerja yang baik dengan nilai capaian sebesar 109,55% dan indikator capaian kinerja berwarna hijau. Pengukuran capaian kinerja Pusat Riset Kelautan tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Logical Framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 109,55% dengan indikator capaian berwarna hijau.



Gambar 12. Nilai Capaian Kinerja Pusriskel Tahun 2023

Dari hasil pengukuran kinerja Pusat Riset Kelautan pada Tahun 2023 seluruh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah memiliki capaian sebagai berikut:

Tabel 47. Capaian Kinerja Pusriskel Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA		2023		
		T	R	%
1.	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	29	43,53	120,00
2.	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (Naskah Kerjasama)	3	4	120,00
3.	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100	100	100,00
4.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan (%)	≤ 0,5	0	120,00
5.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	78	91,24	116,97
6.	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Kelautan (Nilai)	75	80,35	107,13
7.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (Nilai)	93	96,49	103,75
8.	Persentase Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92	116,58	120,00
9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Kelautan (%)	80	80	100,00
10.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada Unit Kerja Pusat Riset Kelautan (Inovasi)	1	1	100,00
11.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)	93,75	90,98	97,05
12.	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (Nilai)	82	85,96	104,83

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Capaian kinerja Pusat Riset Kelautan selama Tahun 2023 sudah baik (Nilai NKO diatas 100%) dan dicerminkan dengan indikator berwarna hijau, namun demikian dalam proses pencapaian target kinerja pada Tahun 2023 dijumpai beberapa permasalahan. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya adalah:

- a) Beberapa kegiatan kontraktual dikerjakan pada periode Triwulan IV bahkan ada beberapa pekerjaan yang berakhir pada tanggal 15, 18 dan 20 Desember 2023, hal ini sangat berisiko pada gagalnya penyelesaian dan pembayaran pekerjaan;
- b) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023 tidak mencapai target dimana capaiannya adalah 90,98 dan targetnya adalah 93,75. Dari 8 komponen pembentuk nilai terdapat 2 komponen yang berkontribusi kurang/ rendah yakni komponen Deviasi Halaman 3 DIPA dan Penyerapan Anggaran.

Terkait dengan permasalahan diatas maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Kegiatan kontraktual apalagi yang memiliki nilai pekerjaan diatas 200 juta agar diselesaikan paling lambat pada periode Triwulan II. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan kontraktual tidak terlalu berisiko tinggi, ikut mendukung maksimalnya capaian nilai IKK IKPA dan mendorong capaian realisasi anggaran satker;
- b) Setiap Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan (PJPK) seyogyanya Menyusun Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Capaian Fisik dan Anggaran sebagai target dan selalu mengawal progress pelaksanaan kegiatannya dan harus bisa memenuhi target tersebut. Pemenuhan target tersebut akan berdampak pada minimnya Deviasi Halaman 3 DIPA dan terpenuhinya target capaian realisasi anggaran.



LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN PUSAT RISET KELAUTAN

JALAN PASIR PUTIH II LANTAI IV ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAN www.kkp.go.id EMAIL pusriskel@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PUSAT RISET KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yayan Hikmayani**
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Riset dan
Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Plt. Kepala Pusat Riset
Kelautan

Yayan Hikmayani

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT RISET KELAUTAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	2	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan	3	Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5
		4	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3
		5	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100
		6	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5
		7	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (indeks)	78
		8	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75
		9	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	92
		10	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		12	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	1
		13	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89
		14	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	<i>Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan</i>	2.800.000.000
2	<i>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</i>	30.850.000.000
TOTAL ANGGARAN PUSAT RISET KELAUTAN TAHUN 2023		33.650.000.000

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Riset dan
Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radjarta

Pihak Pertama
Plt. Kepala Pusat Riset
Kelautan

Yayan Hikmayani



Perjanjian Kinerja Revisi April 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PUSAT RISET KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hendra Yusran Siry**
Jabatan : Kepala Pusat Riset Kelautan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 April 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Riset dan
Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Pusat Riset Kelautan


Hendra Yusran Siry

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT RISET KELAUTAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	2	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan	3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5
		4	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3
		5	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100
		6	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5
		7	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (indeks)	78
		8	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75
		9	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	92
		10	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		12	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	1
		13	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89
		14	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	<i>Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan</i>	<i>2.800.000.000</i>
2	<i>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</i>	<i>30.850.000.000</i>
TOTAL ANGGARAN PUSAT RISET KELAUTAN TAHUN 2023		33.650.000.000

Jakarta, 17 April 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Riset dan
Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Pusat Riset Kelautan


Hendra Yusran Siry

Perjanjian Kinerja (PK) Pusriskel Revisi November 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAN www.kkp.go.id SUREL pusriskel@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PUSAT RISET KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hendra Yusran Siry**
Jabatan : Kepala Pusat Riset Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Pusat Riset Kelautan


Hendra Yusran Siry

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT RISET KELAUTAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan	1	Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	29
		2	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3
		3	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100
		4	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan (%)	≤ 0,5
		5	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (indeks)	78
		6	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75
		7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	93
		8	Persentase unit kerja Pusat Riset Kelautan yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	92
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Kelautan (%)	80
		10	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Pusat Riset Kelautan (Inovasi)	1
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (nilai)	93,75
		12	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen	31.235.000.000
	<i>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</i>	<i>31.235.000.000</i>
TOTAL ANGGARAN		31.235.000.000

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Pusat Riset Kelautan


Hendra Yusran Siry

Surat Perintah Tim Penyusun LKJ Tahun 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAM www.kkp.go.id

SURAT PERINTAH

PLT. KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN
NOMOR :B.266/BRSDM.2/TU.110/III/2023

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)
PUSAT RISET KELAUTAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PLT. KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya *good governance* dan *clean governance* dalam rangka tata pemerintahan yang baik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara maka perlu adanya Laporan Kinerja (LKj) Triwulan dan Tahunan.
- b. bahwa berdasar pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Surat Perintah Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT PERINTAH PLT. KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) PUSAT RISET KELAUTAN TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Kepala Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini,
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Penanggung Jawab :
Memberikan pembinaan terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023;
 2. Ketua :
Memberikan arahan terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023;

3. Sekretaris :
Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023;
4. Anggota :
Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan serta menyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023.

- KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023, bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Riset Kelautan.
- KEEMPAT Masa kerja berlaku Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 sebagaimana diktum PERTAMA selama 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan keputusan ini.
- KELIMA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pusat Riset Perikanan Tahun 2023 Nomor SP DIPA 032.12.403821/2023 Tanggal 30 November 2022.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Maret 2023

PLT KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN



LAMPIRAN : Surat Perintah PLT. Kepala Pusat Riset Kelautan Tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)
PUSAT RISET KELAUTAN
TAHUN 2023**

Penanggung Jawab : Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan
Ketua : Dr. Ifan Ridlho Suhelmi, M.Si.
Sekretaris : Joko Hardono, S.Si, ME.
Anggota : Erish Widjanarko, S.T.
Triyono, S.Si, M.T.
Theresia Lolita N., M.Si.
Nia Naelul Hasanah R., M. Soc.,Sc.
Efi Noferya, S.Pi.
Rais Rozali, S.H, M.H.
Arid Ahmad Ridwan, SE.
Yulhendri Suryansyah, S.Pi, M.Si.
Dr. Niken F. Gusmawati, M.Si.
Dra. Yayah Shobariyah
Drs. B. Realino S, M.Si.
Falia Maumentia, LL.M.
Cecep Ahmad H, S.T, M.Eng.
M. Hikmat Jayawiguna, S.St.Pi, M.Si.
Sitti Khadijah Nurhappy, S.Pi, M.T.
Donal Daniel, S.T, M.T.
R. Tri Anggono T. Pranoto, A.Md.
Adi Darmawan, S.Kom.
Sari Novita, S.T.
Utami Retno Kadarwati, M.Sc.
Megananda, SE

PLT. KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN



**Komplek Bina Samudera
Jalan Pasir Putih I, Ancol Timur
Gedung BPPSDMKP 2 Lantai 4-5
Jakarta Utara 14430**

